

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN  
PORNOGRAFI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

**Agung Ika Restuningsih**

**NIM: 1402026032**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**

**Dr. Agus Nurhadi, MA.**

NIP. 19660407 199103 1004.

Jl. Wismasari No V/20 Ngaliyan, Semarang

**M. Harun, S.Ag.,M.H.**

NIP.19750815 200801 1 017

Perum. Beringin Indah Blok A, kecamatan Ngaliyan, kota Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Agung Ika Restuningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Agung Ika Restuningsih

NIM : 1402026032

Jurusan : Hukum Pidana Islam

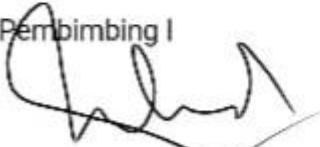
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap San  
Tindak Pidana Penyebaran Pornografi dalam Putusan Pengadilan  
Negeri Nomor 751/Pid.B/2017/Jkt.Brt.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Agustus 2020

Pembimbing II

Pembimbing I  


**Dr. Agus Nurhadi, M.A.**

NIP. 19660407 199103 1004.

**M. Harun, S.Ag.,M.H.**

NIP. 19750815 200801 1 017

**Dr. Agus Nurhadi, MA.**

NIP. 19660407 199103 1004.

Jl. Wismasari No V/20 Ngaliyan, Semarang

**M. Harun, S.Ag.,M.H.**

NIP.19750815 200801 1 017

Perum. Beringin Indah Blok A, kecamatan Ngaliyan, kota Semarang

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Agung Ika Restuningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Agung Ika Restuningsih

NIM : 1402026032

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 751/Pid.B/2017/Jkt.Brt.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Agus Nurhadi, M.A.**

NIP. 19660407 199103 1004.

**M. Harun, S.Ag.,M.H.**

NIP. 19750815 200801 1017



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-3758.3/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Agung Ika Restuningsih  
NIM : 1402026032  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.  
Pembimbing I : Dr. Agus Nurhadi, MA  
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H.

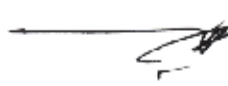

Telah dimunafasahkan pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag., M.H.  
Penguji III : Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.  
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.


dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

  
  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 2 Oktober 2020  
Ketua Program Studi,

  
Rustam DKAH., M.Ag.

## MOTTO

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“Dan sesungguhnya, kami telah menguji orang – orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang – orang yang benar dan pasti mengetahui orang – orang berdusta” (QS. Al-Ankabut 29:3)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Evamedia Arkanleema)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT uang dengan rahmat-Nyalah penulis bisa menyelesaikan tugas ahir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak..

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

kedua orang tuaku:

Bapak Darwadi dan Ibu Kulyati terimakasih atas pengeorbanan dalam membesarkan membimbing serta selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, selalu mendoakan pagi, siang, malam bahkan setiap waktu, dan selalu mendukung penulis baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai.

Keluarga besarku:

Adik Muhammad Rofi'i, simbah Sukarni yang juga selalu memberi semangat, Kakak Beni Desta Pramana, yang sudah dianggap kakak sendiri, terimakasih selalu ada buat penulis, selalu buat tersenyum dan selalu memberikan semangat serta selalu memberikan doa untuk keberhasilan dalam hidupku.

## DEKLARASI

Nama : Agung Ika Restuningsih  
NIM : 1402026032  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT TENTANG SANKSI  
TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 14 Agustus 2020

Deklarator,



Agung Ika Restuningsih

NIM.1402026032

## ABSTRAK

Dalam perkembangan ahir-ahir ini Pornografi sangat meresahkan bagi masyarakat karena Pornografi merusak moral bagi siapapun yang melihat, Pemerintah sendiri berupaya agar Penyebaran Pornografi tidak semakin meluas dan dapat di tanggulangi. Yang dimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sedangkan Pornografi adalah Tindak Pidana yang dilarang oleh Undang - Undang yang disertai ancaman Pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut, Pornografi juga mempunyai arti sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis yang digambarkan dengan tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.? Dan yang ke dua (2) yaitu untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam perkara penyebaran Pornografi dalam Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian analisis yang dihimpun melalui kajian teks putusan pengadilan yang berupa Putusan Hakim Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi yang berasal dari Pengadilan Jakarta Barat. Sumber data yang digunakan yaitu berupa dokumen atau Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT sebagai data primer, sedangkan dalam data sekunder menggunakan buku yang membahas tentang Hukum Pidana Islam serta literatur kepustakaan lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis.

Hasil Analisis ini bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang Tindak Pidana penyebaran Pornografi Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan Pidana penjara selama 7 Tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- subsidi 6 bulan kurungan kepada terdakwa, Kasus dalam Putusan Perkara Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT dengan terdakwa Chandy dengan kasus Penyebaran Pornografi. Dalam pertimbangan Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana penyebaran Pornografi, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum, serta terdakwa juga harus memperanggung jawaban perbuatannya. Yang sebagai mana yang sudah didakwakan kepada terdakwa dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU.NO 44/2008 Tentang Pornografi. Sedangkan dalam Islam sendiri perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah melanggar aturan dan meresahkan Masyarakat. meskipun dalam Islam tidak mengatur tentang sanksi Pornografi tapi hal ini erat kaitannya dengan Tindak Asusila, maka dalam hal ini sanksi yang tepat buat terdakwa yaitu menurut Hukum Pidana Islam tentang penyebaran Pornografi, terdakwa di kenakan sanksi ta'zir yang dimana sanksi tersebut ditentukan oleh Ulil Amri atau Hakim yang berkuasa yang dimana sanksi tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Sanksi, Tindak Pidana, Pornografi.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan bagi masyarakat pada umumnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Agus Nurhadi, MA. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan Skripsi
2. Bapak M Harun, S.Ag., M.H trimakasih sudah membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Bapak Dr.H. ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, mengajar serta membimbing penulis selama menempuh studi program S1 jurusan Hukum Pidana Islam.
7. Bapak Darwadi dan Ibu Kulyati yang selalu mendoakan penulis, trimakasih selalu memberikan cinta kasihnya dan menjadi orang tua terbaik untuk penulis.
8. Saudara penulis, Muhammad Rofi’i
9. Beni Desta Pramana trimakasih cinta kasihnya
10. Sahabat dan teman-teman Siyasa Jinayah angkatan 2014.
11. Serta teman KKL,PPL,KKN dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada mereka yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi penyusunan yang lebih baik. Semoga pembahasan dalam skripsi ini bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin.

Semarang, 18 Agustus 2020

Penulis



**Agung Ika Restuningsih**

NIM. 1402026032

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

#### C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fatḥah	Ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fatḥah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xi

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI

A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	13
3. Subyek Tindak Pidana .....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Jarimah .....	16
2. Unsur – Unsur Jarimah.....	17
C. Pengertian Sanksi Dari Pidana.....	17
1. Pengertian Pidana .....	17
2. Unsur- Unsur Pidana .....	20
D. Sanksi Bagi Pelaku Penyebaran Pornografi Menurut Hukum Positif .....	21

E. Sanksi Bagi Pelaku Penyebaran Pornografi Menurut Hukum Islam.....	23
F. Pengertian Pornografi dan Tindak Pidana Pornografi.....	25
1. Pengertian Pornografi.....	25
2. Tindak Pidana Pornografi.....	26

### **BAB III : TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 751/Pid.B/PN.JKT BRT**

A. Deskripsi Kasus.....	28
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	31
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	36
D. Keterangan Saksi.....	37
E. Pertimbangan Hakim.....	38
F. Amar Putusan .....	43

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 751/Pid.B/PN.JKT BRT TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 751/Pid.B/PN.JKT BRT Tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi. ....	45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 751 / Pid.B /PN.JKT BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi. ....	52
C. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang sanksi Tindak Pidana penyebaran Pornografi .....	59

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
C. Penutup .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kasus Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang penyebaran Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa Chandy Abdul Rohim alias M. Haru yang yang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi yang dimana terdakwa “membuat, menyebarluaskan, menyiarkan Pornografi secara ekplisit yang membuat keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang- Undang RI Nomor 44 Tahun 2008”. Dalam hal ini terdakwa melanggar dua (2) dakwaan, dimana dakwaan yang pertama tentang pasal pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dakwaan yang ke dua yaitu melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP<sup>2</sup>. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa Chandy Abdul Rohim alias M. Haru dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan denda sejumlah Rp500.000,-(lima Ratus Juta Rupiah) dengan subsider 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Dalam kasus di atas juga menjelaskan tentang Tindak Pidana penyebaran Pornografi di dalam pasal 282 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya di dalam Negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh diancam dengan Pidana Penjara paling lama satu (1) Tahun enam (6) bulan atau Pidana denda paling tinggi Rp.4500.00,- (empat ribu lima ratus rupiah)<sup>3</sup>. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat (I), yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Pasal 369 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

<sup>3</sup> Andi hamzah, *KUHP&KUHP* edisi revisi, (Jakarta :Rineka Cipta, 2012). Hlm 112

Dalam Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT terdakwa diputus bersalah melakukan Tindak Pidana “Membuat, menyebar luaskan, dan menyiarkan pornografi yang secara eksplisit memuat keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan” sebagai yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 29 Jo pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>4</sup> Dan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000,000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan Pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan.

Dengan demikian, Tindak Pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang disertai ancaman Pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut UUP yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa terdakwa yang bernama Chandy Abdul Rohim alias M. Heru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : membuat, menyebarluaskan dan menyiarkan Pornografi yang secara eksplisit<sup>6</sup> membuat keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; yang dimana membuat seseorang rugi dalam hal materi dan moral didalam masyarakat.

Pornografi sendiri adalah Tindak Pidana yang dilarang oleh Undang - Undang yang disertai ancaman Pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perubahannya yang terdiri dari berbagai macam penduduk dan masyarakat,serta berbagai agama yang diakui keberlakuannya<sup>7</sup> dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahklak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati Kebhinikaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat martabat manusia dalam setiap warga Negara. Tindak Pidana Pornografi diatur

---

<sup>4</sup> di dalam Undang - Undang Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan,menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) di Pidana dengan Pidana Penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

<sup>5</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/194/4/062211004\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/194/4/062211004_Bab3.pdf) , *Tindak Pidana Pornografi dalam Undang – Undang No. 44 TAHUN 2008*, dikutip pada tanggal 30/08/2019, hari jum’at, jam 04.26

<sup>6</sup> Eksplisit Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adalah Gamblang, Tegas, Terus Terang, Tidak Berbelit - Belit (Sehingga Orang Dapat Menangkap Maksudnya Dengan Mudah Dan Tidak Mempunyai Gambaran Yang Kabur Atau Salah Mengenai Berita, Keputusan, Pidato, Dan Sebagainya); Atau Tersurat

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bogor:Prenada Media), 2003 hal 136

dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimana Pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang dimana hal tersebut memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Teknologi Informatika sendiri sudah mengubah masyarakat kita baik dibidang sosial, ekonomi, dan budaya secara langsung. Teknologi Informasi sangatlah bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, yang pada dasarnya untuk menunjang kehidupan umat manusia agar lebih baik dari sebelumnya, hal ini membuat kehidupan menjadi lebih efektif dan lebih efisien.<sup>9</sup> Adanya kemajuan Teknologi tentunya memberikan suatu dampak yang positif maupun dampak negatif bagi penggunaanya. Teknologi Informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia dan sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Dalam hal ini dampak dari Teknologi adalah bahwa Pornografi juga mempunyai layanan yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya yang dimana hal tersebut memuat tentang Pornografi.<sup>11</sup> Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 dan Pasal 29 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Pornografi mempunyai arti sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>12</sup> Dalam hal ini menegaskan bahwa pengertian Pornografi adalah maksud dan tujuan dari penggambaran tersebut yaitu membangkitkan nabsu birahi dalam seks tersebut, dan hal ini pun juga menyebabkan berkembangnya Pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila di masyarakat.

Pornografi sendiri bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal, hal ini disebabkan oleh kehidupan sosial yang bermasyarakat, Pornografi sendiri memiliki banyak arti di setiap kelompok sosial, dalam hal ini Pornografi dipengaruhi oleh cara pandang yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan agama. Contohnya seperti budaya barat yang

---

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta, Prenadamedia Group), Hlm 279-280.

<sup>9</sup> Nurdiman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Depok:Raja Wali Pers, 2017), Hlm 11

<sup>10</sup> Undang - Undang Dasar Reuplik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>11</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta, Prenadamedia Group), Hlm 280.

<sup>12</sup> Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia* (Surabaya, Lima Bintang) Hlm 331.

menganggap lumrah tentang Pornografi sedangkan budaya Timur dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma, Sehingga hal tersebut dianggap sebagai Tindak Pidana Pornografi, demikian pula dengan pengertian Pornografi pada negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama islam namun taat kepada agama yang dianut dan hukum adat setempat, ataupun dengan negara sekuler yang tidak mengakui adanya Tuhan (ateis).

Dalam Hukum Islam, Pornografi masuk dalam perbuatan yang berkategori sebagai perbuatan Jarimah, dan dalam hal ini Islam melarang untuk mendekatinya. Dalam Ayat Al-Quran yang mengharamkan jarimah zina, diantaranya adalah sebagai berikut.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ كَأَنَّ فَا حِشَّةً وَ سَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk (QS.Al-Isra’(17):32)*

Dalam pandangan Islam, Pornografi diqiyaskan ke dalam kejahatan Tindak Pidana yang dimana kejahatan tersebut bisa dihukum dengan hukuman jarimah Hudud, Ta’zir, Qisas dan sebagainya, dikarenakan dalam hukum Islam kejahatan Pornografi tidak ada secara langsung yang menyebutkan dan mengatur tentang hukum pornografi. Maka dalam mengambil hukumannya melalui pihak yang berwenang (pemerintah) atau melalui hukum yang sudah ada.

Dari penjelasan diatas terkait tentang Pornografi, Islam sudah mengatur tentang masalah Pornografi bahkan dalam batasan-batasan yang lebih jelas. Hukum Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian serta memelihara pandangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi setiap pemilik tubuh yang bersangkutan.

Dalam surat An-Nur ayat 30 menjelaskan tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan, yang dimana berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Pornografi.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Begitu pula dengan orang yang suka menyebarluaskan perbuatan mereka yang diatas ranjang, agar semua orang bisa melihatnya, maka hukuman bagi mereka adalah had, Nabi SAW dengan keras menggambarkan mereka seperti setan.

هَلْ تَدْرُونَ مَا مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مِثْلُ شَيْطَانَةٍ لَفِئَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَصَى مِنْهَا حَاحَتَهُ وَالتَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

*“tahukah apa pemisalan seperti itu?” kemudian beliau berkata “sesungguhnya hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertamu dengan setan laki-laki disebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajadnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihatnya” (HR Abu Dawud).*

Dalam Islam sendiri sudah menjelaskan bahwa tubuh manusia merupakan amanah dari Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan, maka dari itu kita diwajibkan untuk menjaga dari perbuatan tercela yang merugikan bagi tubuh kita.<sup>13</sup>

Hal ini pun juga mendapatkan perhatian khusus dari Majelis Ulama Indonesia yang dimana hal tersebut memperoleh fatwa, dan fatwa itu berisi tentang penyelesaian batasan Pornografi Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Adapun isi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah<sup>14</sup>:

- a) Bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
- b) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram
- c) Melakukan pengambilan gambar sebagai mana dimaksud pada langkah langkah adalah haram.
- d) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual adalah haram
- e) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual adalah haram.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas maka siapapun yang melakukan perbuatan Tindak Pidana maka akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yang dijatuhkan oleh majelis yang berkuasa.

---

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornomaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 86.

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornomaksi*, (Surabaya: MUI Jatim, 2012), hlm. 13

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi penyebaran Pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang penyebaran Pornografi ?
- 2 Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Putusan 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang sanksi Tindak Pidana penyebaran Pornografi ?
- 3 Bagaimana analisis Hukum Positif terhadap Putusan 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang sanksi Tindak Pidana penyebaran Pornografi ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **C.1 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang Tindak Pidana penyebaran Pornografi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam dalam perkara penyebaran Pornografi. Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum positif dalam perkara penyebaran Pornografi. Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.

### **C.2 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya, terkait tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi Tindak

Pidana menyebarluaskan Pornografi dalam studi putusan nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT Tentang Pornografi.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasannya khususnya dibidang Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca jurnal ilmiah. Hasil penelitian, dan skripsi lainnya. Adapun buku dan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi M. Fahmi Afif yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana menyebarkan Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa 1). Sanksi Tidak Pidana Penyebarluasan Pornografi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi adalah jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam pasal 4 ayat (1) sesuai dalam ketentuan Pidana didalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa pelaku dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau Pidana dengan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 2) adapun Sanksi Hukum Islam bahwa Hukuman bagi pelaku pelaku Tindak pidana tersebut dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak Ulin Amri dengan standar ukuran dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadits. Pengambilan Hukum Tindak Pidana menyebarluaskan Pornografi dan Sanksinya dalam pandangan Hukum Islam di –Qiyas-kan dengan kejahatan berbagai macam Tindak Pidana, bisa dihukum dengan hukuman ta'zir.<sup>15</sup>
- 2) Skripsi Dalle Ambotang yang berjudul *Analisis Yuridis Tindak pidana Pornografi dalam media Elektronik (studi kasus putusan nomor.01/Pid.B/2015/PN.Mks)* berdasarkan skripsi ini maka hasil analisis fakta dan data yang ada , maka mengambil kesimpulan yang: 1) penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalmputusan perkara Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks, sudah tepat. 2) majellis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologi

---

<sup>15</sup> M.Fahmi Afif, Nim. 132211073, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang ornografi*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 Tahun, penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan, mengingat kerugian terhadap korban sangat besar.<sup>16</sup>

- 3) Skripsi Alfi Quthni Aswad yang berjudul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)*. hasil penelitian pertama, dasar hukum terhadap pelaku penayangan Pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana, dalam perkara Putusan Nomor 1320/Pid.B/ 2009/PN.Mks. meskipun Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. 2) Pertanggung Jawaban Pidana terhadap penayangan Pornografi dalam Perkara Nomor 1302/Pid.B/2009/PN.Mks, lebih tepatnya penuntut umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.<sup>17</sup>
- 4) Skripsi Nurcholis, yang berjudul *Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah menunjukkan perbuatan kejahatan, karena dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan yang mendekati zina yang diharamkan, selain itu Cyber Pornography juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja baik terhadap perilaku, moral(ahlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat.<sup>18</sup>
- 5) Jurnal Ilmu Hukum, Erinda Sinaga dan Mukhlis R. Dan Erdiansyah, yang berjudul *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Pornografi telah merusak moral masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda. Dalam hal ini Pornografi menjadi perhatian khusus bagi penegakan Hukum dan dalam hal ini masyarakat harus bekerja sama untuk memerangi Pornografi. Pornografi sendiri telah diperlakukan dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Dalle Ambota, Nim. B 11110190, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik ( Studi Kasus Putusan No01/Pid.B/2015/PN.Mks )* Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

<sup>17</sup> Alfi Quthni Aswad,10500112084, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” ( Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016

<sup>18</sup> Nurcholis, 1110043100006, *Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

<sup>19</sup> Erinda Sinaga, Mukhlis R Dan Erdiansyah, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Volume 8 No 4, Oktober 2014: Universitas Riau.



- 6) Jurnal Suratman, Ardi Winjaya Laksana, dengan Judul Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. Pornografi adalah kejahatan yang bersifat privasi sehingga pemberantasan Pornografi agak sedikit kesulitan, seperti yang terjadi pro kontra Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kejahatan Pornografi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, hasil penelitian merujuk pada Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi terdiri dari Unsur Subyektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan. Serta unsur Obyektif yaitu dimana perbuatan (menjadi) yang artinya obyek atau model yang mengandung muatan Pornografi.<sup>20</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan dengan Undang-Undang (*statute approach*), yang menurut tulisan ini disebut pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang sanksi Tindak Pidana penyebaran Pornografi.

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya *fact finding* serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lain yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.<sup>22</sup> Fakta yang menjadi obyek adalah Putusan Pengadilan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang sanksi penyebaran Pornografi.

### 2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan bahan atau data yang di peroleh dari studi kepustakaan dalam studi tersebut sebagai mana dibawah ini :

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>20</sup> Ardi Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm 93

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm 10

Penelitian ini mempunyai sifat memaksa, bahan hukum primer bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulis,<sup>23</sup> sumber data primer yaitu berupa dokumen atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku Hukum Pidana Islam, asas-asas Hukum Pidana Islam, dan literatur –literatur kepustakaan lainnya yang menunjang analisis atau yang berkaitan dengan pembahasan hukum pidana Islam terhadap sanksi penyebaran pornografi.

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian skripsi adalah menggunakan data-data, dokumentasi yang menggunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*).

4) Analisis Data

Analisis data adalah data yang merupakan upaya pencarian yang dimana menata secara sistematis, dan untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan bagi peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan memberikan informasi sebagai semua bagi orang. Proses analisis yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses analisis yang dilaksanakan atau didasarkan pada deskriptif dan kualitatif. Deskriptif itu sendiri yang dimana yang telah didapatkan yang kemudian hasil dari analisis tersebut akan disajikan secara menyeluruh, sedangkan kualitatif itu sendiri adalah mengembangkan teori hukum positif yang dimana dengan tujuan agar menguatkan dan melemahkan teori yang ada atau tanpa menggunakan rumusan statistik.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempermudah dan memahami penulisnya ini secara keseluruhan maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5(lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008) Cet 4, Hlm 93

Bab II Tinjauan Umum yang berisi tentang penyebaran ketentuan Pidana Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pornografi yang meliputi pengertian Pornografi baik secara etimologi maupun terminology, dasar hukum Pornografi baik Hukum Positif atau Hukum Islam.

Bab III Putusan Pengadilan Negeri Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT. Yang berisi tentang diskripsi kasus, dakwaan dituntut Jaksa Penuntut Umum, dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim serta Amar Putusan pada perkara Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.

Bab IV Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 751/Pid.B/2017/PN.Jkt Brt. Analisis dalam penetapan Hukum Tindak Pidana penyebaran Pornografi.

Bab V Penutupan. Yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran serta penutupan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SANKSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI

#### A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

##### A.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup> dalam istilah Belanda Tindak Pidana adalah *Stafbaar Feit* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah seperti Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana, Tindak Pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Tindak Pidana mempunyai banyak penafsiran diantaranya ialah:

- a) Muljatno yang mengatakan bahwa perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (Undang-Undang) yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana jika dilanggar.<sup>26</sup>
- b) Simons menerangkan bahwa *Stafbaar Feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c) VOS mendefinisikan bahwa *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang- Undang .sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Dalam hal ini para sarjana Indonesia menerjemahkan kata *strafbaarfeit* antara lain: Tindak Pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sedangkan dalam perundang-undangan digunakan sebagai istilah untuk mengartikan kata *strafbaarfeit* diantaranya adalah:<sup>27</sup>

- a. Peristiwa Pidana dalam istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.

---

<sup>24</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama* ,(Jakarta: Kencana 2014) Hlm 35.

<sup>25</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) Hlm 68.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rineka Cipta,2008) Hlm 59

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama* ,(Jakarta: Kencana 2014) Hlm 36-37.

- b. Perbuatan Pidana dalam istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan –pengadilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum mempunyai istilah yang dimana hal ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalinge*.
- d. Hal yang diancam dengan Hukum juga mempunyai istilah yang dimana diguakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesai Perselisian Perburuhan.
- e. Tindak Pidana mempuyai istilah yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang, misalnya:
  - 1) Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
  - 2) Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
  - 3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan Tindak Pidana yang merupakan kejahatan.

## A.2 Unsur- Unsur Tidak Pidana

Tindak Pidana adalah dasar dari suatu dasar dalam Hukum Pidana, yang juga bisa diartikan sebagai Yuridis. Dalam hal ini seseorang yang melakukan Tindak Pidana yang sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat, adapun Tindakan Tindak Pidana tersebut harus mencakup tempat kejadian, waktu, dan keadaan yang dimana Tindak Pidana itu terjadi.<sup>28</sup> Tindak Pidana sendiri tidak bisa dijatuhkan pidana karena sesuatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Untuk itu dibutuhkan dua syarat yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Maka dari itu pengertian Tindak Pidana menjadi jelas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya Tindak Pidana maka dalam rumusan peraturan Undang-Undang Pidana tentang perbuatan yang dilakukan yang disertai dengan sanksi maka dalam rumusan tersebut ditentukan dalam beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tidak Pidana juga merujuk pada sifat perbuatannya saja yaitu dengan ancaman pidana.

---

<sup>28</sup><http://artonang.blogspot.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>. *Unsur-Unsur Tidak Pidana General Knowledge (Pengetahuan Umum)*, diakses pada Hari Senin Tanggal 27/01/2020 Jam 22.49 Wib.

Menurut Karni mengatakan bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Menurut Winjono Pradjodikoro mengatakan bahwa definisi pendek, yakni : Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang perlakunya dapat dikenakan Pidana

Menurut Simons menyebutkan bahwa unsur – unsur Tindak Pidana (*strafbaar feit*) ialah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Di ancam dengan Pidana (*strafbaar gesfeld*)
- c) Melawan hukum (*on reechmatig*)
- d) Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Hal inipun Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari Tindak Pidana:

a. Unsur Obyektif

- 1 Perbuatan orang
- 2 Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3 Mengenai adanya keadaan tertentu yng menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat openbaar di muka umum.

a) Unsur Subyektif

- 1 Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2 Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa unsur – unsur Tindak Pidana yaitu:

a) Kelakuan dan Akibat

b) Hal dalam keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Yang dibagi menjadi 2(dua) Unsur yaitu:

1) Unsur Obyektif

Yaitu unsur yang mengenai keadaan, seperti Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang dimana harus dilakukan dimuka umum. Dalam Pasal 332 (Schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyutujuinya. Dalam hal ini unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan yang dimana bisa memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

2) Unsur Subyektif

---

<sup>29</sup> Dikutip Dari Bukunya Prof Sudarto, *Hukum Pidana* 1, Cetakan Ketiga, (Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang) Hlm 65.

Yaitu mengenai orang yang melakukan perbuatan, seperti halnya Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat (I) sub C Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal II Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Unsur pegawai Negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur Tindak Pidana ialah:

- a) Subyek dari pelaku Tindakan.
- b) Kesalahan dari Tindakan
- c) Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut
- d) Sesuatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu Tindak Pidana.

### **A.3 Subyek Tindak Pidana**

Subjek dari hukum pidana adalah manusia, dan manusia juga sebagai objeknya. Maka dari situlah hukum berasal dan dari situlah hukum dijalankan serta manusialah yang menegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana yang diuraikan bahwa unsur Tindak Pidana itu adalah perbuatan orang yang pada dasarnya melakukan Tindak Pidana yaitu manusia serta dapat disimpulkan berdasarkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Dalam rumusan delik Undang – Undang lazim dimulai dengan kata-kata “barang siapa yang” kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”
- b. Dalam pasal 10 KUHP juga disebutkan jenis – jenis Pidana yang dapat dikenakan kepada Tindak Pidana, yaitu:

Pidana Pokok:

- 1 Pidana mati;
- 2 Pidana penjara;
- 3 Pidana kurungan
- 4 Pidana denda, yang dapat digandi dengan pidana kurungan.

Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak- hak tertentu;
2. Perampasan barang – barang tertentu;
3. Diumumkannya putusan hakim;

Tetapi dalam perkembangannya bahwa subjek dari Tindak Pidana tidak hanya manusia melainkan juga badan hukum khususnya dalam korporasi. Korporasi sendiri dalam buku 1 Pasal 120 Rancangan KUHP Tahun 1987/1988, yang diiberi pengertian sebagai berikut:<sup>30</sup>

*“korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan” (sjahdeni, 2009: 45)*

Dalam KUHP juga ada pasal lain tentang yang menyangkut tentang korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam hal ini yang diancam pidananya adalah orang yang melakukannya bukan korporasinya. Sedangkan Menurut M.v.T terhadap pasal 59 KUHP yang berbunyi, “Suatu Tindak Pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

### **B.1 Pengertian Jarimah**

Dalam bahasa Arab Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah atau jinayah. Sedangkan Dalam istilah etimologis jarimah sendiri berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang mempunyai arti “perbuatan” dan “memotong”.<sup>31</sup> Sedangkan menurut terminologi diartikan sebagai larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta’zir. Para ahli Hukum Islam sering menggunakan kata *Janayat* sebagai kejahatan, janayat juga mengandung pengertian sebagai perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang.<sup>32</sup>

Menurut Abdul Qadir’Audah mengatakan bahwa Tindak Pidana dalam hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang dimana orang yang melakukan kesalahan akan membawa hukum yang ditentukannya. Dalam hal ini istilah yang digunakan adalah kejahatan yang dimana kejahatan sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tercela. Maka sudah pasti perbuatan yang tercela maka sudah dipastikan perbuatan itu disebut sebagai kejahatan.<sup>33</sup>

Jarimah sendiri diartikan sebagai perbuatan dosa seperti bentuk, macam-macam atau sifat perbuatan dosa yang dilakukannya, contohnya yaitu pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan perbuatan lain yang berkaitan dengan kejahatan lainnya. Jarimah juga identik dengan pengertian hukum positif sebagai Tindak Pidana atau artikan sebagai delik.

---

Hlm 50 <sup>30</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama* ,(Jakarta: Kencana 2014)

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta, Kencana: 2019) Cet 1, Hlm 1.

<sup>32</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*,(Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia:2009) Hlm 16.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm 17



## B.2 Unsur-Unsur Jarimah

Dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Pidana yaitu apabila terpenuhi Unsur – Unsur perbuatan Pidana yaitu.

1. Adanya nas yang melarang disertai sanksi hukumannya. Dan unsur ini disebut dengan unsur formil (rukun syar'i). Dimana perbuatan tersebut jika tidak ada larangan atau perintah maka perbuatan tersebut hukumnya boleh dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Adanya perbuatan pidana, unsur ini disebut dengan unsur materiel (rukun madi). Hampir sama dengan yang diatas yang dimana jika tidak ada perbuatan melawan huum maka perbuatan tidak mungkin dikatakan jarimah.
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf), dan unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun adabi).dikatakan bahwa perbuatan itu jarimah apabila adanya perintah atau larangan dari syara, yang dimana hanya ditunjukan kepada orang yang mempunyai akal sehat.

Sedangkan Menurut pendapat Asep Saepuddin Jahar *et al.*, berpendapat bahwa unsur –unsur perbuatan pidana terfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu

- 1) Subjek perbuatan, yaitu pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yang dimana keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan yang membuat seseorang yang terbukti melakukan Tindak Pidana
- 2) Objek perbuatan, yaitu perbuatan yang dilarang dalam bahasa Indonesia sebagai Tindak Pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Istilah-istilaha tersebut merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa arab.
- 3) Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana serta kepadanya dapat dianggap bertanggungjawaban. Istilah ini juga bisa disebut sebagai istilah uqubah dalam bahasa Arab.

## C. Pengertian Sanksi dari Pidanaan

### C.1 Pengertian Pidanaan

Pidana dan pidanaan tidak bisa dipisahkan karena pidana dan pidanaan memiliki keterikatan satu sama lain, pidana dan pidanaan di Indonesia dimulai sejak masa Wetboek Van Strafrecht (Wvs) dan di Undang-Undang kan pada tahun 1915 dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan dalam Undang – Undang Nomor 1/1946 tentang KUHP.<sup>34</sup> Sedangkan pidanaan sendiri diartikan sebagai penghukuman, yang dimaksud yaitu tahap penetapan sanksi dalam Hukum

---

<sup>34</sup>Fajrin Recht, *Pidana Dan Pidanaan (Hukum Penitensier)*, <http://kita.bpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pidanaan.html>, diakses pada hari selasa, tanggal 17/03/2020 jam 0202 Wib.

Pidana tersebut.<sup>35</sup> Pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan Tindak Pidana yang dimana tindakan tersebut sebagai tindakan melawan hukum. Pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak melakukannya kembali.

Dalam pidana mempunyai suatu tujuan yang dimana tujuan tersebut memiliki tujuan yang sangat penting. Yang bertujuan untuk meninjau konsep pidana itu sendiri dengan menekankan pada aspek rumusan tentang pidana. Dalam hal ini teori tentang tujuan pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan diantaranya adalah:<sup>36</sup>

1. Harbert L. Packer yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) pandangan yaitu:
  - a) pandangan retributif yaitu mengatakan bahwa pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, yang dimana pandangan ini sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya.
  - b) Pandangan utilitarian yang dimana pandangan ini melihat dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana agar dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang serupa.
2. Mulandi membagi teori tentang tujuan pidana menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :
  - a) Teori absolut yang dimana pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.
  - b) Teori teleologis (tujuan) yang dimana teori ini memandang bahwa pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi bertujuan sebagai sarana yang bermanfaat.
  - c) Teori retributif-teleologis dimana teori ini menggabungkan antara prinsip teleologis dan retributif sebagai satu kesatuan.

Sedangkan tujuan pidana yang berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2005 yaitu:

Pada Pasal 55 paragraf 1 yaitu pidana bertujuan untuk:

- a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

---

<sup>35</sup> Ray Pratama Siandar, *Pengertian, Jenis-Jenis dan Tujuan Pidana*, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, diakses pada tanggal 17/03/2020 hari Selasa, jam 02:12 Wib

<sup>36</sup> Zainal Abidin, *Pidana, Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3*, (Jakarta: Elsam: 2005), Cet 1, Hlm 10.

- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dan
- e) Memaafkan terpidana.

Dari aturan di atas dapat dicermati bahwa dalam R-KUHP menganut teori prevensi, rehabilitasi dan restoratif dalam tujuan pemidanaan.

- a) Dalam KUHP, Pidana diatur dalam Bab II Pasal 10 KUHP yang menjelaskan tentang jenis-jenis pidana sebagai berikut:
  - 1 Pidana mati
  - 2 Pidana penjara
  - 3 Pidana kurungan
  - 4 Pidana denda
  - 5 Pidana tutupan (merupakan jenis pidana baru, karena ada dengan UUNomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan)
- b) Pidana tambahan yang terdiri dari:
  - 1 Pencabutan hak-hak tertentu.
  - 2 Perampasan barang-barang tertentu.
  - 3 Pengumuman putusan Hakim

Adapun aturan pemidanaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam tabel berikut.<sup>37</sup>

NO	JENIS PIDANA	ATURAN PEMIDANAAN
	Pidana Pokok	
1	Pidana Mati  (pasal 11 jo Pasal 10 KUHP)	Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tiang gantung, tapi berdasarkan Penpres Nomor. 2/1964 mengatakan bahwa: ditembak dibagian jantung dan/atau kepala dan tidak dilakukan di muka umum (rahasia, baik waktu dan tempat eksekusinya).  (hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada anak, orang gila dan ibu hamil).

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2	Pidana penjara  (pasal 12 tentang Permasyarakatan)	Hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara/pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu (min 1 hari, selama-lamanya 15 tahun atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun). Pidana penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP/LAPAS). Untuk pemulihan kembali hubungan antara narapidana dan masyarakat, penghuninya disebut narapidana /napi.
3	Pidana kurungan	Dilaksanakan di penjara, tapi lebih bebas, ada hak <i>pistole</i> yaitu tersedianya fasilitas yang lebih dari terpidana penjara.
4	Pidana Denda  (pasal 30 ayat (1) KUHP dan UU No. 1/1960)	Dengan adanya pidana denda seringkali penerapan Hukum Pidana menjadi kabur karena pidana denda dianggap bukan pidana karena pelaku tadi ada di LP.
5	Pidana Tutupan  (UU No. 20/1946)	Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasarkan oleh suatu motivasi yang patut dihormati/dihargai. Tempatnya di penjara, namun, namun diberikan fasilitas yang lebih baik karena terpidana boleh membawa dan menikmati buku bacaan dan radio/tape. Dan untuk hukuman ini terdapat 1 yurisprudensi di Jogja.

## C.2 Unsur – Unsur Pemidanaan

Unsur pemidanaan merupakan keadaan yang muncul setelah diwujudkannya perbuatan, Yang dimana ditentukan sebagai syarat untuk dapat dipidananya si pembuat. Dan apabila perbuatan itu tidak memenuhi syarat maka wujud dari perbuatan tersebut tidak melawan hukum. jadi pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>38</sup>

Unsur – unsur pemidanaan harus mengandung beberapa sifat pemidanaan, diantaranya adalah:

---

<sup>38</sup> Fajrin Recht, *Pidana dan Pemidanaan (Hukum Penitensier)*, diakses pada hari Rabu Tanggal 01/04/2020 Jam 02.55  
Wib

- 1 Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2 Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atau perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- 3 Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

#### **D. Sanksi Bagi Pelaku Penyebaran Pornografi Menurut Hukum Positif**

Menyebarkan adalah perbuatan yang menyebarkan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain dan orang lain itu menjadi tahu, dengan berbagai cara untuk menyebarkannya seperti melalui media sosial (facebook, twitter dan lain sebagainya), melalui media cetak, dan melalui media siaran (TV dan Radio). Dilihat dari hukum Tindak Pidana ini adalah Tindak Pidana Formil.

Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi adalah Tindak Pidana Formil-Materiil, semi materiil, formil tidak murni, atau materiil yang tidak murni.<sup>39</sup> Penyebarluasan sama dengan menggandakan atau memperbanyak. Dalam hal ini untuk menyebarkan perlu dahulu untuk menggandakan atau memperbanyak sebuah benda atau obyek tersebut. Apabila perbuatan menyebarkan belum di sebar maka perbuatan tersebut belum dikatakan Tindak Pidana, beda lagi bila sesuatu itu sudah di sebarluaskan maka itu sudah termasuk dalam Tindak Pidana. Undang-Undang Pornografi sendiri memperluas arti dari penyebarluaskan yang termasuk dalam penyiaran, mengunduh, mengimpor mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, meminjamkan, dan menyediakan.<sup>40</sup>

Penyebarluasan pornografi merupakan hasil dari tindakan dari pornoaksi yang dimana pornoaksi sendiri merupakan tindakan melakukan eksploitasi seksual, pornoaksi menurut KBBI adalah tingkah laku secara erotis yang mengundang berahi, Pornoaksi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga Pornoaksi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dalam hal ini para pelaku vidio porno sebagian besar melakukan untuk hal bisnis agar mendapatkan uang.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan berkepribadian baik, menghormati sesama masyarakat. Dalam kitab Undang- Undang sudah dijelaskan tentang

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Cet.1, Jakarta : Sinar Greafika, 2016), hlm. 126.

<sup>40</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

hukum bagi pelaku Tindak Pidana penyebaran Pornografi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dimana sudah diterangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi :

*“sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*

Pornografi sendiri masih termasuk masalah masyarakat yang sangat serius, tidak hanya itu dizaman yang sangat mudah ini masyarakat bebas mengakses berbagai informasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan di dalam Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 sudah jelas hukuman bagi penyebar Tindak Pidana Pornografi itu. Dalam pasal 29 menerangkan Hukuman bagi pelaku penyebar pornografi ialah dari minimal 6 (enam) bulan dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 ( enam miliar rupiah )

Dalam Bab XVI tentang Kesusilaan pasal 310 menjelaskan tentang:<sup>41</sup>

1. Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau kerena terpaksa untuk membela diri.

Sedangkan dalam pasal 321 yang berbunyi<sup>42</sup>:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencermarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP Edisi Revisi*,(Jakarta: Reneka Cipta, 2012) cet 18. Hlm 124

<sup>42</sup> *Idip* hlm 128

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahriannyasedangkan itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya yang menjalankan pencahrian tersebut.
3. Kejahatan itu tidak dituntut kalau tidak ada dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320 ayat (2) dan (3)

## E. Sanksi Bagi Pelaku Penyebaran Pornografi Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam Pornografi tidak di jelaskan secara jelas tentang sanksi Tindak Pidana Pornografi, maka sehubungan dengan sanksi Tindak Pidana Pornografi maka dilihat dari berat ringannya perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku, maka dalam hal ini sanksi bagi Tindak Pidana Pornografi bisa masuk dalam bentuk hukuman hudud, qisas, ta'zir atau sebagainya. Dalam hal ini sanksi bagi Tindak Pidana Pornografi diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti halnya sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi yang diputuskan oleh ulil amri.

### 1 Jarimah Hudud

Kata Hudud berasal dari bahasa Arab Hadd yang berarti pencegahan, penekanan atau larangan. Hudud sendiri mencakup semua jarimah baik hudud itu sendiri, qisas, maupun diat, secara terminologi hudud merupakan sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sebagaimana yang telah ditentukan secara jelas dalam berbagai nash dan ditentukan dengan jelas hukumannya Baik melalui Al Qur'an maupun Hadis.<sup>43</sup> Sebagai mana dalam Firman Allah SWA

و تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ....(1)

*“itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (Ath-Thalaaq 65:1)*

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَاَ....

*“itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” (Al- Baqarah 187 : 2)*

Menurut sebagian ahli Hukum Pidana Islam yang berpendapat bahwa Hudud tidak hanya meliputi tujuh macam jarimah melainkan sembilan yaitu zina, meminum khamr, liwath (homosaksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah:2016) Cet 1, Hlm 47.

<sup>44</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia:2009) Hlm 19

Menurut Syeh Nawawi Al Bantani mengatakan bahwa Hudud adalah sanksi yang ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar, baik dalam rangka memberikan peringatan atau memaksanya.

Ciri- ciri Tindak Pidana Hudud sebagai berikut

- a) Kejahatan Hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah
- b) Hukum bagi pelakunya di tentukan oleh Allah
- c) Menyangkut kepentingan publik
- d) Tidak ada tingkatan
- e) Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan
- f) Tidak boleh ada keraguan sedikitpun
- g) Jenisnya sudah ditentukan yaitu meminum khamar, zina, liwath(homoseksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.

## 2. Jarimah Qishash

Secara bahasa qisas berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qshashan yang berarti mengikutin atau menelusuri jejak kaki, maksud dari menelusuri jejak kaki adalah di mana antar jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Secara terminologi qisas memiliki kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiyaya akibat menganiyaya. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith mengatakan bahwa qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku Tindak Pidana sama persis dengan Tindak Pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.

Sebagai contoh dalam Injil Matius 5: 38-42 terdapat pernyataan yesus sebagai berikut.<sup>45</sup>

*“kamu telah mendengar firman : mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu: janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama ia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolah orang yang mau meminjam dari padamu.”*

Secara garis besar qisas dibedakan menjadi dua kategori, yaitu

- a) Qisas terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja atau tidak sengaja
- b) Qisas terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melalui salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah:2016) Cet 1, Hlm 30



### 3. Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa Arab Razir memiliki makna al-Man'u artinya pencegahan, sedangkan menurut istilah adalah at-Ta'dib (pendidikan) jadita'zir secara definisi adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had atau kifar.<sup>47</sup> Dalam fiqh jinayah, takzir merupakan suatu bentuk jarimah yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Jarimah ta'zir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan jarimah qisas yang dimana hukumannya ditentukan oleh syara.

Ulama sepakat menetapkan bahwa ta'zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan qisas, hukuman ta'zir sendiri diterapkan pada dua kejahatan yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban dan kejahatan melanggar larangan.

## F. Pengertian Pornografi Dan Tindak Pidana Pornografi

### F.1 Pengertian Pornografi

Menurut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatakan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Sedangkan Pornografi Menurut Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, serta bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>49</sup> Yang dimana dalam hal ini menekankan bahwa adanya maksud untuk membangkitkan birahi.

Sedangkan menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang melanggar Tindak Pidana tanpa terkecuali Tindak Pornografi maka siapapun itu akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.<sup>50</sup>

Menurut RUU Arti Pornografi sendiri adalah bahwa bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan, atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang

---

<sup>46</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia:2009) Hlm 45

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm 54.

<sup>48</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornogrifi

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>50</sup> Tim Penyusun, Fatwa MUI Tentang *Pornografi dan Pornaksi*, (Surabaya: MUI Jatim, 2012), hlm. 13

menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain.<sup>51</sup>

Sementara menurut Abu Al-Ghifari mengatakan bahwa pornografi adalah tulisan, gambar lukisan, tanyangan audio visual, pembicaraan dan gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.<sup>52</sup>

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Pornografi adalah segala sesuatu, baik tulisan, gambar, maupun ucapan, yang mampu mengakibatkan atau membangkitkan nafsu birahi seseorang.

## F.2 Tindak Pidana Pornografi

Pornografi adalah gambar atau, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>53</sup> Tindak pidana pornografi sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008.<sup>54</sup> Pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dimana kata tersebut bermakna *porne* yang berarti “gadis nakal, pelacur, gadis liar, penjaja seks, sedangkan *Graphein* yang berarti “tulisan, gambar – gambar, ungkapan dan sebagainya”.<sup>55</sup> Tindak pidana Pornografi ini termuat dalam pasal 282 ayat 1 : Barang siapa yang :

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau
- b. Untuk Menyiarkan, dipertunjukkan, kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukan dalam negeri, mengirim terus kedalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau
- c. Terang- terangan atau, dengan menyiarkan tulisan dan tanpa permintaan, menawarkan atau menunjukan bahwa boleh didapat : tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya : melanggar kesusilaan (*aanstoetelijk voor de eerbaarheid*), dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga bulan.

Ayat 2 memuat perbuatan yang sama tetapi tidak dengan unsur kesengajaan, melainkan dengan unsur culpa, yaitu kata-kata yang diketahui isinya, gambar yang melanggar unsur kesusilaan yang dimana hukuman maksimalnya adalah sembilan bulan atau denda sama.

---

<sup>51</sup> Pikiran Rakyat Cyber Media, *Kuburan Batasan Pornografi*, diakses pada hari minggu Tanggal 22/12/2019 jam 21.21 Wib.

<sup>52</sup> Menurut Abu Al-Ghifari yang ditulis diskripsi Iswan Haris, Tindak Pidana Pornografi Dalam Perseptif Hukum Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>54</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP* (Jakarta, Kencana 2016), cet 1 hlm 279

<sup>55</sup> A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hlm. 7.

Menurut ayat 3, kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 1 jika dijadikan kebiasaan atau pekerjaan maka hukumannya adalah 2 tahun delapan bulan penjara atau denda paling banyak lima ribu rupiah.<sup>56</sup>

Dalam perkembangannya Pornografi di bedakan dalam tiga pengertian yang pertama adalah kecabulan, yang dimana yang dimaksud dengan pecabulan disini adalah meredahkan derajat seorang wanita. Yang kedua adalah ketertarikan terhadap gambar-gambar yang tidak senonoh dan humor yang vulgar, dan dimana hal ini akan merusak mental seseorang. Dan yang ketiga adalah akan mejadikan istilah pornoaksi, hal ini yang membuat ketertarikan yang akan mengarah ke aktivitas seksual.

Pada dasarnya Pornografi belum mempunyai kreteria yang jelas yang dimana kreteria itu belum bisa membedakan antara mana yang dimaksud pornografi mana yang dimaksud tidak pornografi. Seperti halnya memakai pakaian yang dimana hal ini masih tabuh karena bisa dianggap pornografi atau tidak. Pornografi sendiri dari waktu ke waktu mengalami perubahan makna. Dimana perubahan itu di pengaruhi oleh kehidupan sosial dan pandangan dari masyarakat itu sendiri.

Pornografi sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Yang sebelumnya dari Undang-Undang kesusilaan, Undang – undang ITE dan KUHP, maka dari maraknya kejahatan pornografi melalui media sosial seperti Facebook, Twiter dan media sosial lainnya yang membuat semakin mudahnya mengakses konten negatif maka dari situ pemerintah mebuat peraturan tentang Pornografi yang dimana hal itu diatur di Undang-Undang tentang Pornogrfi. Dalam hal ini Pemerintah tegas mengatur mengenai Tindak Pidana Pornografi. Pornografi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiringnya berkembangnya internet yang bisa diakse dengan mudah, hal ini membuat Indonesia darurat Pornogrfi menurut Kementrian dan Informasi (Kemenkominfo) mengatakan bahwa pada tahun 2018 hingga ahir semester pertama 2019 menemukan sebanyak 898.108 konten Pormografi yang dimana Konten Pornografi tersebut menjadi konten negatif tertinggi dari keseluruhan jenis konten lainnya di Indonesia.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ( Edisi ketiga : Bandung, Refika Aditama) hlm 113 – 114

<sup>57</sup><https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internetindonesia/0/> sorotan\_media diakses pada hari Minggu pada tanggal 22/12/2019, jam 21.30 Wib.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 751/Pid.B/PN.JKT BRT**

##### **A. Deskripsi Kasus**

Dalam kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengambil Putusan Perkara Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT dengan kasus Tindak Pidana Penyebaran Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa Chandy Abdul Rohim alias M. Haru yang beralamatkan di Dusun III RT.010/RW.OO5, Desa Manggarai, Kecamatan. Labuan Manggarai, Kabupaten Lampung Timur, Profinsi Lampung. Yang dimana Terdakwa juga Recidivis yang menjalani hukuman di LAPAS Subang dalam perkara Pembunuhan.

Kronologi kejadiannya ialah bahwa Terdakwa Chandy alias M.Haru membuat akun Facebook dengan akun yang bernama M. Haru<sup>58</sup>, Terdakwa mengambil foto M. Haru untuk dijadikan foto profil facebook Terdakwa. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa melihat saran perteman yang salah satunya adalah akun facebook saksi Fransisca<sup>59</sup>, terdakwa Chandy meminta pertemanan kepada saksi Fransisca tapi saksi Fransisca belum menerima pertemanan dari terdakwa Chandy.

Setelah dilihat oleh saksi Fransisca bawa akun facebook yang bernama M. Haru ini adalah anggota ke Polisian dan saksi mengetahui bahwa terdakwa Chandy juga berteman sama sesama anggota ke Polisian barulah saksi Fransisca menerima pertemanan dari akun facebook yang bernama M. Haru. Setelah terdakwa Chandy tahu kalau facebooknya dengan akun M. Haru diterima oleh saksi Fransisca terdakwa menjalin komunikasi lewat inbox yang pada intinya menanyakan kabar dan tempat tugas dari saksi Fransisca.

Setelah terjalin komunikasi dengan baik di inbox terdakwa Chandy meminta nomor hp dan pin BBM yang pada waktu itu masih menggunakan BBM dari saksi Faransisca dengan beralasan pekerjaan, saksi Fransiska memberi Nomor Hp dan BMM pada terdakwa Chandy. setelah terdakwa Chandy mendapatkan Nomor yang diminta, hubungan terdakwa Chandy dan saksi Fransiska semakin dekat yang dimana membuat terdakwa Chandy mulai egois dan mulai mengatur saksi Fransisca yang dimana membuat saksi Fransisca tidak nyaman dengan terdakwa Chandy dan saksi Fransiska memutuskan untuk mengahiri hubungannya dengan terdakwa Chandy.

Tidak selang beberapa hari terdakwa Chandy menghubungi saksi Fransisca kembalin untuk meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakaukan oleh terdakwa Chandy, dan saksi Fransisca memaafkan terdakwa Chandy, setelah itu hubungan terdakwa Chandy dan saksi Fransisca membaik. Dalam keadaan yang sudah baik terdakwa Chandy memanfaatkan momen dimana terdakwa Chandy meminta foto dari saksi Fransisca. dan tanpa berfikir karena hubungan terdakwa Chandy dan saksi

---

<sup>58</sup> M. Haru adalah anggota polisi lalu lintas di Polda Banten.

<sup>59</sup> Saksi Fransisca adalah anggota Polisi yang Dinas di Staff Gakkum Sie Provost POLRES Jakarta Barat sebagai BRIPKA.

Fransiska baik maka saksi Fransiska memberikan foto yang diminta oleh terdakwa Chandy dan setelah terdakwa Chandy mendapatkan foto pertama terdakwa Chindy meminta foto yang kedua kalinya yang dimana foto yang dimintanya untuk yang kedua kalinya adalah foto bagian atas yang diminta oleh terdakwa Chandy yang dimaksud adalah foto yang kelihatan bagian atas (payudara). Dengan seketika saksi Fransiska menolak terdakwa, terdakwa Chandy tidak kehilangan akal dalam hal ini terdakwa merayu serta beralasan cuman mau melihat lalu dihapus tapi saksi Fransiska tetap menolak saksi Fransiska tidak semudah itu untuk dibohongin dan tidak percaya dengan perkataan terdakwa Chandy, saksi Fransiska tetap tidak mau mengirim foto yang diminta oleh terdakwa Chandy dan saksi Fransiska tidak mau memperkelihatakan bagian atasnya (payudaranya) itu, tapi dengan berbagai alasan yang bermacam-macam terdakwa Chandy menyakinnkan saksi Fransiska untuk mengirim fotonya itu, dalam hal ini saksi Fransiska mulai percaya dengan ucapannya terdakwa Chandy dan tanpa berfikir panjang saksi Fransiska mempercayai ucapan terdakwa Chandy dan saksi Fransiska mulai percaya serta langsung mengirimkan foto bagian atasnya yang kelihatan payudaranya tersebut kepada terdakwa Chandy.

Setelah terdakwa Chandy mendapatkan foto – foto saksi Fransiska itu, terdakwa Chandy mulai membuat vidio tentang saksi Fransiska yang dimana vidio itu berisi tentang foto-foto yang dikirim oleh saksi Fransiska kepada terdakwa Chandy yang dimana tujuan awal terdakwa Chandy meminta foto-foto tersebut hanya untuk memeras saksi Fransiska, setelah vidio yang berisis foto-foto saksi Fransiska sudah selesai, terdakwa Chandy mulai menghubungi saksi Fransiska untuk meminta uang. Tanpa disadari saksi Fransiska sudah ditipu oleh terdakwa Chandy, terdakwa Chandy menghubungi saksi Fransiska hanya untuk meminta uang kepada saksi Fransiska, tapi dalam hal ini saksi Fransiska beralasan kalau saksi tidak mempunyai uang, karena tujuan terdakwa Chandy tidak tercapai dan dengan nada mengancam terdakwa Chandy memperlihatkan vidio tentang saksi Fransiska yang dimana vidio itu berisi tentang foto-foto saksi Fransiska yang kelihatan bagian atas ( payudara) dan setelah diperlihatkan kepada saksi, terdakwa Chandy mengancam akan menyebarkan vidio itu ke youtube jika saksi Fransiska tidak memberika sejumlah uang kepada terdakwa Chandy, dalam hal ini saksi Fransiska ke bingung karena diwaktu itu saksi Fransiska tidak mempunyai uang sebesar itu. Saksi Fransiska sendiri meminta waktu kepada terdakwa Chandy untuk mencari pinjaman uang, dan dalam hal ini terdakwa Chandy mengiyakan itu. Alih –alih mencari uang saksi Fransiska malah menceritakan masalah itu ke pada temen saksi Fransiska yang bernama saksi Turmuzi dan saksi Anjar Sopandi<sup>60</sup>, saksi Fransiska meminta bantuan agar saksi Turmuzi untuk meminjamkan uang

---

<sup>60</sup> Saksi Turmuzi dan Anjar Sopandi sudah menasehati saksi Fransiska agar melaporkan kejadian ini ke SPK Polda Metro Jaya tapi saksi Fransiska bersikeras karena takut kalau saksi melapor akan dipecat.

yang diminta terdakwa dan mentranfer ke rekening terdakwa atas nama Kartikawati<sup>61</sup>, dan setelah ditransfer saksi Fransiska menghubungi terdakwa Chandy agar vidio yang ada di youtube bisa dihapus.<sup>62</sup>

Masalah ini tidak berhenti disitu, tidak lama setelah kejadian itu terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Fransiska dengan nominal yang sangat tinggi ketimbang permintaan terdakwa yang pertaman, di sini terdakwa Chandy meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam hal ini saksi Fransiska menolak dan saksi Fransiska berdalih tidak mempunyai uang sebanyak itu, setelah permintaannya ditolak oleh saksi Fransiska, terdakwa Chandy menghubungi saksi Fransiska lewat Telepon terdakwa Chandy yang dimana tujuannya adalah untuk mengancam saksi Fransiska agar saksi Fransiska memberikan uang sebesar itu. Di tangan pembecaraan itu HandPhon terdakwa Chandy diminta oleh atasan terdakwa dan dalam hal ini temen terdakwa Chandy juga ikut mengancam saksi Fransiska agar mengirimkan uang, dalam hal ini temen terdakwa Chandy berbicara, jika tidak memberikan uang maka vidio foto tentang saksi Fransiska akan disebar lagi oleh terdakwa Chandy dan temennya. Dalam hal ini saksi Fransiska tidak memberikan apa yang diminta oleh terdakwa Chandy dengan nominal uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) setelah saksi Fransiska tidak memberikan uang yang diminta terdakwa Chandy meminta lagi uang sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dengan alasan bahwa terdakwa akan pindah ke aceh. Dalam hal ini saksi Fransiska tidak langsung mengirim uang tersebut lantaran memang tidak mempunyai uang sebanyak itu.<sup>63</sup>

Ketidak nyamanan saksi Fransiska atas tindakan terdakwa Chandy maka saksi Fransiska melaporkan kejadian tersebut ke SPK Polda Metro Jaya, dalam hal ini saksi Fransiska mengirim beberapa uang agar saksi Fransiska tidak kehilangan jejak terdakwa Chandy, saksi Fransiska slalu mentranfer terdakwa Chandy dengan menggunakan rekening Kartikawati dan Oky Riyanto<sup>64</sup>. Dalam hal ini perbuatan terdakwa Chandy tersebut telah menyebabkan keresahan, dan kerugian secara moril dan materiil terhadap saksi Fransiska karena vidio yang disebar oleh terdakwa Chandy yang bisa di akses secara umum oleh siapapun.

---

<sup>61</sup> terdakwa meminta uang ke saksi Fransiska sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) tapi saksi Fransiska tidak mempunyai uang, saksi Fransiska lalu meminjam uang ke temannya yang bernama Turmudzi dan saksi Fransiska meminta Turmudzi mengirmkannya ke rekening terdakwa.

<sup>62</sup> Sebelum saksi Fransiska mengirim uang, terdakwa sudah menyebarkan vidio saksi Fransiska ke youtube dengan judul “polwa mesum Bripka Fransiska Endang (1)” dan “polwa mesum Bripka Fransiska Endang (2)”

<sup>63</sup> Dikarenakan saksi tidak mengirim uang yang diminta terdakwa, maka terdakwa mengirim pesan ke saksi melalui aplikasi WhatsApp bahwa vidio sudah disebar di youtube dengan judul “polwa mesum Bripka Fransiska Endang (1)” dan “polwa mesum Bripka Fransiska Endang (2)” serta “polwa mesum Bripka Fransiska Endang (3)”

<sup>64</sup> tanggal 20 Agustus 2016 saksi Fransiska mengirim uang sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2016 saksi Fransiska mengirim uang sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dikirim ke rekening BNI atas nama Kartikawati dengan nomor 0449109600. Dan mengirim ke rekening BNI atas nama Oky Riyanto dengan nomor 0345816244 dengan jumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah )

Dalam hal ini perbuatan terdakwa sendiri sebagaimana yang diatur, terdakwa Chandy diancam dengan Pidana dalam Pasal 369 ayat ( 1 ) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana.<sup>65</sup>

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa diajukan di Persidangan dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Jaksa Penuntut Umum mengajukan persidangan terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Chandy alias M.Harru yang berada di Lapas Kelas II Subang Jawa Barat atau setidaknya –tidaknnya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Subang Jawa Barat, atau setidaknya –tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Subang Jawa barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili pemeriksaan terdakwa CHANDY ABDUL ROHIM Alias M. HARRU tersebut, Terdakwa telah membuat, menyebarkan, menyiarkan pornografi yang secara eksplisit membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dilakukan oleh terdakwa Chandy:

Terdakwa Chandy sendiri berada didalam dalam Lapas Subang Jawa Barat karena Tindak Pidana Pembunuhan dan dijatuhi hukuman lima belas (15) Tahun Penjara, terdakwa Chandy membuat akun facebook dengan atas nama M. Harru yang dimana M. Harru ini adalah Polisi Lalu Lintas Polda Banten, terdakwa menggunakan HandPhone temennya yang bernama Dio yang dimana Dio ini adalah sama – sama Napi di Lapas Kelas II Subang Jawa Barat, yang dimana HP dari Dio di pinjam untuk membuat akun facebook. Dan setelah akun facebook yang bernama M. Harru jadi, terdakwa mulai mencari teman yang dimana dilihatnya di dalam beranda ada saran pertemanan yang salah satunya adalah akun milik saksi Fransiska, dalam hal ini terdakwa langsung meminta pertemanan ke akun saksi Fransiska tersebut.<sup>66</sup>

Dalam hal ini saksi Fransiska menghiraukan pertemanan terdakwa di facebook tapi setelah di lihat ternyata terdakwa berteman dengan sesama anggota Polisi lainnya dan hal itu membuat saksi Fransiska menerima pertemanan terdakwa Chandy alias M.Harru, setelah terdakwa tahu sudah

---

<sup>65</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-barat> Diakses Pada hari selasa tanggal 22/10/2019 jam 12.23 Wib.

<sup>66</sup> *Ibid.*

diterima pertemanannya terdakwa Chandy alias M.Harru menghubungi saksi Fransisca melalui inbox untuk menanyakan kabar dan tempat kerja dari saksi Fransisca.

Setelah terjadi komunikasi dengan baik terdakwa Chandy meminta Nomor HandPhon dan BBM saksi Fransisca dengan alesan pekerjaan sesama Polisi, maka saksi Fransisca memberika Nomornya yaitu 081210151022 dan pin BBM 2A79A5FB kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan nomor HandPhone dan BBM saksi Fransiska. terdakwa langsung menghubungi saksi Fransiska menggunakan BBM dengan profil foto yang sama seperti yang ada di akun facebook terdakwa Chandy yaitu foto dari M.Harru, tidak hanya melalui BBM tapi terdakwa Chandy juga menghubungi saksi Fransiska melalui Nomor Telefon. Dalam hal ini pun terdakwa Candy slalu merayu saksi Fransisca yang membuat kedekatan antara terdakwa Chandy dan saksi Fransisca menjadi dekat. setelah saling mengenal satu sama lain terdakwa Chandy menunjukan sifat ke egois, terdakwa Chandy yang muncul dan membuat saksi Fransisica tidak nyaman dalam hal ini saksi Fransisca memutuskan untuk menghindari hubungannya dengan terdakwa Chandy.

Setelah kejadian itu terdakwa Chandy menghubungi saksi Fransisca menggunakan aplikasi WhatsApp dengan Nomor 085221768770 yang pada intinya untuk meminta maaf.<sup>67</sup> Dalam hal ini saksi Fransisca memaafkan terdakwa, dan hubungan terdakwa Chandy dan saksi Fransisca terjalin baik seperti sebelumnya, terdakwa Chandy mulai memberanikan diri untuk minta foto kepada saksi Fransiska dan tanpa alih-alih saksi Fransiska memberikan fotonya kepada terdakwa Chandy, tidak lama setelah terdakwa dikasih untuk ke dua kalinya terdakwa Chandy meminta lagi foto kepada saksi Fransiska yang dimana terdakwa Chandy meminta foto yang kelihatan bagian atas (payudara) saksi Fransisca langsung menolak dantidak mau mengirim foto tersebut, terdakwa Chandy mencoba membujuk saksi Fransiska untuk mengirim dengan alasan melihat dan langsung dihapus tapi saksi Fransiska masih ragu dengan perkataan yang di katakan oleh terdakwa Chandy, dengan beberapa alasan yang di janjikan terdakwa Chandy, saksi Fransiska menurut dan mengirim foto tersebut kepada terdakwa Chandy dengan alasan salah satunya langsung dihapus setelah melihatnya.

Setelah terdakwa mendapatkan foto-foto dari saksi Fransiska terdakwa Chandy mebuat foto-foto saksi Fransisca menjadi vidio yang dimana foto –foto tersebut memperlihatkan salah satunya adalah bagian atas (payudara) dari saksi Fransisca, setelah selesai membuat foto vidio terdakwa Chandy mulai menghubungi saksi Fransiska dan mulai memeras dan mengancam saksi Fransisca, agar saksi Fransisca mengirim uang kepada terdakwa Chandy.

---

<sup>67</sup> Dalam hal ini terdakwa sering mengganti nomor dan terahir terdakwa mengganti nomornya dari Nomor 085221768770 menjadi 085222716470 dan saat itulah mereka berkomunikasi dengan menggunakan nomor 085222716470.



Pada hari berikutnya terdakwa mengancam saksi dengan memperlihatkan video foto itu kepada saksi Fransisca dengan tujuan terdakwa Chandy meminta uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) tapi saksi Fransisca bilang kalau saksi tidak mempunyai uang, tapi terdakwa Chandy tidak percaya dan terdakwa mengancam saksi jika tidak video itu akan disebar di youtube dan kantor saksi bertugas, saksi Fransisca khawatir dan menjadi takut maka saksi Fransisca meminta waktu untuk mencari uang dan terdakwa Chandy mengiyakan permintaan dari saksi Fransiska. Alih-alih mencari pinjaman saksi Fransiska bercerita kepada teman sesama anggota Polisi yang bernama saksi Turmuzi dan Ajar Sopandi, setelah cerita saksi Fransiska dinasehati oleh saksi Turmuzi agar melaporkan tindakan terdakwa itu tapi saksi Fransiska tidak mau mendengarkan nasehat dari temennya itu, saksi Fransiska takut kalau namanya jelek dimata ke Polisian dan masyarakat, tidak lama setelah itu saksi Fransiska mendapat pesan singkat dari terdakwa bahwa video foto dari saksi Fransisca sudah disebar di youtube, saksi Fransisca takut dan khawatir lalu saksi Fransiska mengirim uang yang dipinjamnya dari saksi Turmuzi dan mentransfernya melalui rekening atas nama Kartikawati, saksi Fransisca pun mengirim pesan kepada terdakwa Chandy agar terdakwa Chandy menghapus video yang ada di youtube.

Pada hari berikutnya yaitu tanggal 15 Agustus 2016 terdakwa Chandy meminta uang lagi kepada saksi Fransisca dan terdakwa Chandy pun mengancam saksi Fransisca dengan menyebar video jika tidak mengirim uang, tapi saksi Fransisca berdalih tidak mempunyai uang sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setelah saksi Fransisca tidak mengirim uang sebanyak itu terdakwa Chandy meminta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk alasan pindah tapi saksi Fransisca tetap berdalih tidak mempunyai uang, setelah tidak dikasih uang terdakwa Chandy menelepon saksi Fransisca dan mengancam saksi Fransisca lagi dan didalam pembicaraan terdakwa Chandy dengan saksi Fransiska di telepon, HandPhone dari terdakwa Chandy diambil oleh seseorang yang mengatas namakan atasanya terdakwa Chandy dan mengancam saksi Fransiska agar mengirim uang kepada terdakwa Chandy jika tidak maka terdakwa Chandy akan menyebar video tentang saksi Fransisca itu jika saksi Fransisca tidak mengirim uang, Saksi Fransisca takut dan meminta waktu kepada terdakwa Chandy untuk mencari uang dan terdakwa Chandy menyetujui permintaan saksi Fransiska.

Setelah sering diancam oleh terdakwa Chandy, saksi Fransisca memberanikan diri untuk melaporkan terdakwa ke SPK Polda Metro Jaya, saksi Fransisca yang pada saat itu tetap mengirim pesan agar saksi Fransisca tidak kehilangan jejak terdakwa Chandy, saksi Fransisca mengirim uang kepada terdakwa Chandy melalui rekening Kartikawati dan Oky Riyanto dengan jumlah uang sebesar 700.000,-(tujuh ratus ribu) secara bertahap agar tidak kehilangan terdakwa. Hal ini sanggan merugikan saksi baik moril atau materil terhadap saksi Fransisca karena video tersebut bisa diakses oleh semua orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf d Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

#### ATAU

#### KEDUA

Jaksa Penuntut Umum mengajukan persidangan terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Candy yang berada di Lapas Kelas II Subang Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Subang Jawa Barat, mengadili terdakwa Chandy yang telah membuat, menyebarkan, menyiarkan Pornografi yang secara eksplisit membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf d yang dilakukan oleh terdakwa chandy:

Terdakwa Chandy sendiri berada didalam dalam Lapas Subang Jawa Barat karena Tindak Pidana Pembunuhan dan dijatuhi hukuman lima belas ( 15 ) Tahun Penjara, terdakwa Chandy membuat akun facebook dengan nama M. Haru yang dimana M. Haru ini adalah Polisi Lalu Lintas Polda Banten, terdakwa menggunakan HandPhone temennya yang bernama Dio yang sama – sama Napi. Setelah akun facebook yang bernama M. Haru jadi dan dilihatnya di beranda ada saran pertemanan yang salah satunya adalah akun milik saksi Fransiska, terdakwa langsung meminta pertemanan ke akun saksi Fransiska.

Sebelumnya saksi Fransiska menghiraukan pertemanan di facebook tapi setelah di lihat ternyata terdakwa berteman sama sesama anggota polisi dan diterimalah pertemanan terdakwa, setelah terdakwa tahu sudah diterima pertemanannya terdakwa menghubungi saksi melalui inbox untuk menanyakan kabar dan tempat kerja dari terdakwa.

Setelah terjadi komunikasi dengan baik terdakwa meminta nomor dan pin BBM saksi dengan alasan pekerjaan sesama polisi, setelah terdakwa mendapatkan nomor HandPhone saksi Fransiska terdakwa langsung menghubungi saksi dengan profil foto yang sama seperti yang ada di akun facebook terdakwa, semakin kenal terdakwa dengan saksi sifat ke egois terdakwa muncul dan membuat saksi tidak nyaman dan saksi memutuskan untuk mengahiri hubungannya dengan terdakwa.

Setelah kejadian itu terdakwa menghubungi saksi untuk meminta maaf dan saksi Fransiska memaafkan terdakwa, hubungan terdakwa dan saksi terjalin baik seperti sebelumnya, terdakwa mulai minta foto kepada saksi Fransiska dan saksi memberikan foto itu kepada terdakwa, tidak lama setelah terdakwa dikasih untuk ke dua kalinya terdakwa meminta lagi foto kepada saksi Fransiska yang kelihatan bagian atas (payudara) tapi saksi Fransiska tidak mau mengirim foto tersebut, terdakwa Chandy mencoba membujuk saksi Fransiska untuk mengirim dengan alasan melihat dan langsung dihapus tapi saksi Fransiska masih ragu dengan perkataan dari terdakwa, dengan beberapa

alasan, saksi Fransisca mengirim foto tersebut kepada terdakwa Chandy dengan alasan salah satunya langsung dihapus setelah melihatnya.

Setelah terdakwa Chandy mendapatkan foto-foto dari saksi Fransiska terdakwa Chandy membuat foto-foto saksi Fransisca menjadi vidio yang dimana foto –foto itu memperlihatkan salah satunya adalah bagian atas (payudara) dari saksi, setelah selesai membuat foto vidio terdakwa Chandy mulai memeras dan mengancam saksi, agar saksi Fransisca mengirim uang kepada terdakwa.

Pada hari berikutnya terdakwa Chandy mengancam saksi Fransisca dengan memperlihatkan vidio foto itu kepada saksi Fransisca dengan tujuan terdakwa Chandy meminta uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) tapi saksi Fransisca bilang kalau saksi tidak mempunyai uang, tapi terdakwa Chandy tidak percaya dan terdakwa Chandy mengancam saksi Fransisca jika tidak vidio itu akan disebar di youtube dan kantor saksi Fransisca bertugas, saksi Fransisca khawatir dan takut jadi saksi Fransisca meminta waktu untuk mencari uang dan terdakwa Chandy mengiyakan permintaan dari saksi Fransiska. Alih-alih mencari pinjaman saksi Fransiska bercerita kepada teman sesama anggota polisi yang bernama saksi Turmuzi dan Ajar Sopandi, setelah cerita saksi Fransiska dinasehati oleh saksi Turmuzi agar melaporkan tindakan terdakwa itu tapi saksi Fransiska tidak mau kalau namanya jelek dimata kepolisian dan masyarakat, tidak lama setelah itu saksi Fransisca mendapat pesan singkat dari terdakwa bahwa vidio foto dari saksi sudah disebar di youtube, saksi Fransisca takut dan khawatir lalu saksi Fransiska mengirim uang yang dipinjamnya dari saksi Turmuzi dan mentransfernya melalui rekening atas nama Kartikawati, saksiupun mengirim pesan kepada terdakwa agar terdakwa menghapus vidio yang ada di youtube.

Pada hari berikutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi dan terdakwa pun mengancam saksi dengan menyebar vidio jika tidak mengirim uang, tapi saksi berdalih tidak mempunyai uang sebanyak Rp 50.000,000,-(lima puluh juta rupiah) setelah saksi tidak mengirim uang sebanyak itu terdakwa meminta uang sebesar Rp 3.000,000,- (tiga juta rupiah) untuk pindah tapi saksi tetap berdalih tidak mempunyai uang, setelah tidak dikasih uang terdakwa menelepon saksi dan mengancam saksi lagi di tangan pembicaraan telepon HandPhone terdakwa diambil yang mengatas namakan atasanya terdakwa dan mengancam saksi Fransiska bahwa dia akan menyebar vidio itu jika saksi tidak mengirim uang, Saksi Fransisca minta waktu kepada terdakwa untuk mencari uang dan terdakwa menyetujui permintaan saksi Fransiska.

Setelah kejadian itu saksi Fransiska memberanikan diri untuk melaporkan terdakwa ke SPK Polda Metro Jaya, agar tidak kehilangan jejak terdakwa, saksi Fransisca mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening Kartikawati dan Oky Riyanto dengan jumlah uang sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu) secara bertahap agar tidak kehilangan terdakwa. Hal ini sanggan merugikan saksi baik moril atau materil terhadap saksi Fransisca karena vidio tersebut bisa diakses oleh semua orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.<sup>68</sup>

### C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan dipersidangan pada hari senin 23 Mei 2016 yang menuntut terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Chandy memang terbukti bersalah karena melakukan Tindak Pidana “membuat menyebarkan, menyiarkan, atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana sepuluh (10) Tahun penjara setelah terdakwa menjalankan hukuman yang sedang dijalannya dan membayar denda Rp.500.000,00,-( lima ratus juta rupiah ) subsider 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1)1 (satu) bendel percakapan melalui media sosial WhatsApp ;
- 2)2 (dua) lembar print out mutasi rekening ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy transfer Bank Mandiri ;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1)1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dengan IMEI 867408029780571 dan 867408029780563 ;

Dikembalikan kepada saksi FRANSISCA ENDANG YUDIANTI.

- 2)1 (satu) unit HP merek Cross warna hitam nomor IMEI 391012081532081 ;
- 3)1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna hitam ;
- 4)1 (satu) simcard nomor 085222716470 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;<sup>69</sup>

### D. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi:

**Saksi Fransisca** : adalah anggota dari Staf Polisi yang dinas di Staf Gakkum Sie Provost POLRES Jakarta Barat dengan pangkat Bripta membenarkan bahwa saksi mengenal terdakwa

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *ibid*

Chandy melalui aplikasi facebook dan terdakwa Chandy mengenalkan dirinya sebagai anggota Polri yang bernama M. Harru yang dimana M. Harru ini bekerja sebagai Polisi Lalu Lintas di Polda Banten, terdakwa Chandy meminta pertemanan dari facebook dan saksi Fransisca menerima pertemanan dari terdakwa Chandy, bermula dari situ saksi Fransisca mengaku dekat sama terdakwa Chandy. saksi juga belum pernah bertemu sama terdakwa Chandy,

Saksi juga bertukar nomor dan pin BBM ke terdakwa dan hubungan terdakwa menjadi lebih baik, Saksi juga sempat memblokir nomor terdakwa karena saksi merasa tidak nyaman dengan perilaku terdakwa yang suka mengatur saksi, saksi membenarkan kalau terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi menerima permintaan maaf terdakwa dan hubungan saksi dan terdakwa kembali membaik.

Saksi memang mengirimkan foto atas permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa meminta foto lagi tapi ditolak oleh saksi karena saksi takut kalau foto itu disalah gunakan oleh terdakwa tapi waktu itu menurut saksi terdakwa tetap merayu saksi agar mengirimkan foto yang kelihatan atasnya (payudara) saksi percaya dan saksi mengirimkan foto yang diminta oleh terdakwa.

setelah saksi mengirim foto kepada terdakwa tidak lama setelah itu saksi mendapatkan acamana oleh terdakwa jika saksi tidak mengirim uang maka vidio foto akan disebar terdakwa ke You Tube, tapi saksi tidak tahu vidio apa yang dimaksud oleh terdakwa setelah terdakwa mengirim vidio ke saksi dan saksi baru tahu kalau vidio itu adalah foto- foto saksi yang dikirim kemaren. Pada waktu itu saksi khawatir karena takut vidio itu disebar oleh terdakwa tapi saksi meminta waktu untuk mencari uang.

Saksi membenarkan kalau saksi Fransisca Endang Yudianti bercerita kepada temannya sesama Polisi yang bernama Turmudzi dan Anjar Sopandi, saksi Fransisca Endang Yudianti juga meminjam uang kepada Turmudzi dan meminta untuk dikirim ke rekening terdakwa yang bernama Kartikawati, dan saksi meminta agar vidio untuk dihapus.

Saksi membenarkan kalau terdakwa meminta uang ke saksi Fransisca sebesar RP 50.000,000 tapi saksi tidak mempunyai uang sebesar itu dan terdakwa meminta uang Rp 3.000,000 untuk pindah ke aceh, saksi Fransisca Endang Yudianti juga dapat ancaman dari atasan terdakwa jika saksi tidak mengirim uang maka vidio yang berisi tentang foto-foto saksi akan disebar lagi oleh terdakwa Chandy dalam hal ini saksi Fransisca menyanggupin permintaannya, tetapi dalam ini saksi tidak memenuhi permintaan terdakwa Chandy hingga akhirnya terdakwa Chandy menyebar vidio itu ke akun media sosial You Tube. setelah itu saksi Fransisca Endang Yudianti melaporkan terdakwa ke SPK Polda Metro Jaya dan agar tidak kehilangan jejak saksi mentranfer sejumlah uang ke terdakwa dengan rekening atas nama Kartikawati dan Oky Riyanto, dalam hal ini atas keterangan saksi Fransisca, terdakwa tidak keberatan .

**Saksi Turmudzi** adalah teman satu angkatan dari saksi Fransisca satu, saksi Turmudzi membenarkan kejadian itu bawa saksi Fransisca bercerita mendapat ancaman dari akun facebook M. Herru dan saksi Turmudzi membenarkan itu kalau saksi Fransisca mendapat ancaman karena Turmudzi membaca sekilas dari sms Fransisca, Turmudzi dimintai Fransiska untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500,000,-( lima ratus ribu ) atas nama Kartikawati, agar foto- foto yang di sebar oleh terdakwa Chandy di youtube agar bisa dihapus serta Turmudzi membenarkan kalau Fransiska slalu mendapat ancaman oleh Chandy melalui WhatsApp untuk masalah kerugian Turmudzi tidak tahu pasti dan ini sudah merugikan temannya yang bernama Fransisca baik secara moril dan materil.

**Saksi Anjar Sopandi** adalah teman satu angkatan dari saksi Fransiska, Anjar ini membenarkan kalau saksi Fransisca bercerita kalau saksi Fransisca mendapat ancaman dari terdakwa Chandy dan waktu itu saksi Fransisca memperlihatkan vidio yang diunggah oleh terdakwa Chandy di youtube Anjar juga diperlihatkan pesan ancaman dari terdakwa Chandy dan Anjar tidak tahu pasti kerugian dari saksi Fransiska tapi temannya sudah dirugikan secara moril dan materil.

#### **E. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti tindakannya terdakwa bersalah melakukan Tidak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa menanggapi barang-barang bukti di atas, para saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar disita dari terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU : Melanggar Pasal 29 Jo.Pasa 4 ayat (1) huruf d UU.N0.44/2008

Atau KEDUA :Melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP ;<sup>70</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan adalah dakwaan alternatif , maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu: Pasal 29 Jo.Pasa 4 ayat (1) huruf d UU.N0.44 tahun 2008 yang unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun“. Jadi bagi anda pelaku pengancaman bisa dipidana penjara paling lama 4 Tahun.

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ pada unsur kesatu ini adalah siapa saja , setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab . Unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang mengaku bernama Chandy Abdul Rohim alias M. Harro dan identitas Terdakwa tersebut ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya , serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya .Dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa pada unsur kesatu ini ;

**Ad.2. membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;**

Menimbang, bahwa berhubung unsur kedua di atas bersifat alternative, karenanya manakala satu saja perbuatan di atas tersukti maka hal tersebut telah cukup membuktikan unsur kedua ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 2016 , setelah Terdakwa telah mendesak dan merayu saksi Fransisca Endang Yudianti mengirim foto saksi Fransisca Endang Yudianti bagian atas yang terbuka bajunya sehingga terlihat bagian payudara sambil Terdakwa dengan janji tidak akan menyebarkan foto tersebut dan berjanji akan segera menghapusnya setelah foto diterima, atas bujukan Terdakwa tersebut sehingga saksi Fransisca Endang Yudianti mau memberi beberapa buah foto bagian atas yang terbuka dadanya dan terlihat payudaranya.

2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 saksi Fransisca Endang Yudianti menerima pesan dari Terdakwa melalui WhatsApp intinya Terdakwa meminta sejumlah uang dan mengancam saksi Fransisca Endang Yudianti akan menyebarkan Video saksi Fransisca Endang Yudianti di Youtube dengan kalimat “gw udah bikin video loe, mau gw unggah ke youtube” ;
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Fransisca Endang Yudianti yang intinya meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi Fransisca Endang Yudianti mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa mengancam dengan mengatakan “Ooo loe mau maen-maen sama gw, loe mau video loe gw upload ke youtube dan email kantor”;
4. Bahwa dikarenakan merasa khawatir video tersebut disebar di Youtube sehingga saksi Fransisca Endang Yudianti meminta waktu untuk mencari uang dan Terdakwa memberikan waktu hingga pukul 22.00 WIB, setelah itu saksi Fransisca Endang Yudianti tidak mentransfer uang namun menceritakan perihal ancaman dan permintaan uang dari Terdakwa tersebut kepada rekan saksi Fransisca Endang Yudianti yaitu saksi Turmudzi dan saksi Anjar Sopandi ;
5. Bahwa setelah cerita kepada kedua temannya tersebut saksi Fransisca Endang Yudianti kembali menerima pesan singkat dari Terdakwa dengan kalimat “loe liat noh udah gw upload dengan judul Bripka Fransisca Endang Yudianti”, lalu saksi Fransisca Endang Yudianti membuka youtube dan benar di Youtube didapati dua video tentang diri saksi Fransisca Endang Yudianti dengan judul “Polwan Mesum Bripka Fransisca Endang Yudianti (1) dan Polwan Mesum Bripka Fransisca Endang Yudianti (2)”.
6. Bahwa didalam kedua Video yang disebar di Youtube tersebut berisikan foto-foto diri saksi Fransisca Endang Yudianti dengan pose normal seperti biasa dan ada beberapa foto diri saksi Fransisca Endang Yudianti sedang membuka baju yang terlihat bagian dadanya (payudara).
7. Bahwa dikarenakan merasa takut dengan ancaman Terdakwa sehingga saksi Fransisca meminjam uang kepada saksi Turmudzi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus meminta tolong untuk ditransfer rekening yang ditunjuk Terdakwa yaitu rekening BNI nomor 0449109600 atas nama Kartika;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Fransisca di WhatsApp yang intinya meminta uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengancam akan kembali menyebarkan video-video diri saksi Fransisca di Youtube, namun saksi Fransisca tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa dikarenakan tidak memiliki uang sebanyak itu. Selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan singkat di WhatsApp meminta uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk bensin karena Terdakwa akan pindah ke Aceh, Terdakwa mengancam saksi Fransisca dengan kalimat “disini saya pengendalinya, kamu kan Polwan masa uang 3 juta kamu tidak bisa



siapkan, mau gak video itu saya sebar supaya kamu dipecat dan malu sama masyarakat”, karena takut video disebar sehingga saksi Fransisca mau memenuhi permintaan Terdakwa dan meminta waktu untuk mencari uangnya.

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi telah dirugikan selanjutnya supaya tidak kehilangan jejak maka pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 18.59 WIB saksi Fransisca Endang Yudianti mentransfer uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BNI nomor 0449109600 atas nama Kartikawati. Setelah itu pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi saksi Fransisca Endang Yudianti kembali meminta uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke rekening BNI nomor 0449109600 atas nama Kartikawati sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kerekening Bank BNI nomor 0345816244 atas nama Oky Riyanto sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta di atas telah jelas dan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membuat dan menyebarkan Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan - pertimbangan di atas, dengan demikian seluruh unsur Pasal 29 Jo.Pasal 4 ayat (1) huruf d UU.N0.44 tahun 2008 tentang Pornografi<sup>71</sup> sebagaimana dipertimbangkan di atas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan kesatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, sekaligus menjawab pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Foto-foto tersebut dibuat secara sukarela atas dasar rasa sayang adalah tidak benar dan tanpa dasar, sehingga karenanya pleidoi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu di atas maka dengan demikian dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya cukup dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan Majelis di persidangan, berhubung pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka

---

<sup>71</sup>Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan semua unsur dari pasal yang didakwakan serta mempunyai kemampuan bertanggung jawab , maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang dilanggar , Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam , tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan, oleh karena terdakwa sedang menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini akan dijalani setelah proses pemidanaan terdahulu selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut barang bukti, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP di dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan

alasan-alasan / hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

**Hal – hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwah adalah Recidivis yang sedang menjalani pidana

**Hal – hal yang meringankan**

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan melanggar Pasal 29 Jo.Pasa 4 ayat (1) huruf d UU.N0.44 tahun 2008 serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**F. Amar Putusan**

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Chandy Abdul Rohim alias M.HERRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Membuat, menyebarkan dan menyiarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa menjalani hukuman tersebut setelah habis masa hukuman dalam perkara terdahulu yang sedang dijalaninya
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bendel percakapan melalui media sosial WhatsApp.
  - b. 2 (dua) lembar print out mutasi rekening.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy transfer Bank Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- a. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dengan IMEI 867408029780571 dan 867408029780563.

Dikembalikan kepada saksi Fransisca Endang Yudianti.

- a. 1 (satu) unit HP merek Cross warna hitam nomor IMEI 391012081532081.
- b. 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna hitam.
- c. 1 (satu) simcard nomor 085222716470.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-barat> diakses pada hari selasa tanggal 22/10/2019 jam 12.43 Wib.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 751/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT Tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.**

Dalam pemeriksaan dibutuhkan adanya sebuah bukti yang dimana hasil tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam persidangan, hal ini bertujuan untuk memperoleh suatu kepastian guna mendapatkan keputusan yang adil dari hakim. Sedangkan pengertian hakim adalah pejabat negara di Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, Sedangkan dalam istilah hakim mempunyai arti orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang dimana hakim harus memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Berdasarkan dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka hakim harus menjaga kemandiriannya dalam peradilan<sup>73</sup>. Dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum, maka dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan peranan hakim maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, sebagai berikut:<sup>74</sup>

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan :

- 1 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan :

1. mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
2. membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>73</sup> Undang – Undang RI Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Hakim

<sup>74</sup> Tinjauan Pustaka Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Hakim, Digilib. Unila.ac.id Diakses pada hari rabu tanggal 29/07/2020 jam 02.41 wib

2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menanti kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan :

- 1 dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sedangkan dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Pihak yang diadili mempunyai hak hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dimana seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seseorang hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seseorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga, atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sapaai derajat ketiga, atau hungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat.
5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
6. Dalam hal yang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
7. Perkara sebagai dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

---

<sup>75</sup> *ibid*

Sedangkan proses dalam pengambilan putusan tertera dalam Pasal 182 KUHP ialah:<sup>76</sup>

Pasal 182 ayat 1, berbunyi:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum melakukan tuntutan pidana
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terahir.
- c. Tuntutan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 182 ayat 2, yang berbunyi:

Jika cara tersebut pada ayat 1 telah selesai, maka hakim ketua sudah menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Pasal 182 ayat 3, yang berbunyi:

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Pasal 182 ayat 4, berbunyi:

Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Pasal 182 ayat 5, berbunyi:

Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 182 ayat 6, berbunyi:

---

<sup>76</sup> <http://hukumtertulis.blogspot.com/2017/05/pasal-182-kuhp-selesai-pemeriksaan.html>, diakses pada hari Minggu, 02 Agustus 2020 pada jam 22.33 WIB.

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh - sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 182 ayat 7, berbunyi:

Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

Pasal 182 ayat 8, berbunyi:

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.<sup>77</sup>

Dalam perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT dikatakan bahwa terdakwa dengan dakwaan yaitu Melanggar Pasal 29 Jo.Pasal 4 ayat (1) huruf d UU.NO.44/2008 dan melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP oleh Majelis Penuntut Umum, yang berunsur sebagai berikut:

1. Barang siapa<sup>78</sup>;
2. Membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang menggesakan keterlanjangan.<sup>79</sup>

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya dalam Pasal 29 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau*

---

<sup>77</sup> *ibid*

<sup>78</sup> Barang Siapa : dalam hal ini terdakwa Chandy Abdul Rohim alias M.harru telah terbukti melakukan penyebaran Pornografi dan terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa pada unsur kesatu ini.

<sup>79</sup> Sedangkan dalam unsur kedua diatas bersifat alternative, jika barang siapa terpenuhi maka hal tersebut telah cukup membuktikan unsur kedua ini terpenuhi.

*pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).*<sup>80</sup>

Sedangkan dengan pasal 369 KUHP yang berbunyi:<sup>81</sup>

- 1) Barang siapa dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana paling lama 4(empat) Tahun.
- 2) Kejahatann ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Sedangkan Dalam Perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT, dalam Perkara penyebaran Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa Chandy. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penyebaran Pornografi.<sup>82</sup>

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan subsider 6 (enam) bulan kurungan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dengan subsider 10 (sepuluh) bulan kurungan. Berdasarkan hasil dari putusan Majelis Hakim pengadilan Jakarta Barat yang memutus perkara ini, Agus Setiawan,S.H.M.H., Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim tentu sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Sebagaimana telah termuat dalam putusan. Didalam putusan tersebut disebutkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat dalam memutuskan perkara ini, yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan:
  - 1) Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
  - 2) Terdakwa adalah Recidivis yang sedangng menjalani pidana.
- b. Hal- hal yang meringankan:
  - 1) Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

---

<sup>80</sup> Undang-undang Nommor 44 Pasal 29 Tahun 2008

<sup>81</sup> Andi Hamzah, KUHP&KUHP Edisi Revisi, cetakan ke 18, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012) hlm 144

<sup>82</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.



Dalam perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT, yang dimana Majelis Hakim Jakarta Barat yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis dan dua Hakim sebagai anggota menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan dan menyakinkan bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penyebaran Pornografi.<sup>83</sup>

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara Tindak Pidana penyebaran Pornografi dalam Putusan Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT di dasarkan atas beberapa pertimbangan termasuk alasan-alasan pemberat dan peringan pidana. Penulis akan menjelaskan pertimbangan secara menyeluru. Sebelum hakim memutus suatu perkara hakim mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan hal-hal yang meringanan dan memberatkan. Sedangkan dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa Chandy Abdul Rohim alias M. Haru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Membuat, menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ; “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurunga
3. Memerintahkan agar terdakwa menjalani hukuman tersebut setelah habis masa hukuman dalam perkara terdahulu yang sedang dijalaninya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bendel percakapan melalui media sosial WhatsApp.
  - b) 2 (dua) lembar print out mutasi rekening.
  - c) 1 (satu) lembar foto copy transfer Bank Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas.

1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dengan IMEI 867408029780571 Dan 8674088029780563.

Dikembalikan kepada saksi Fransisca Endang Yudianti.

- a) 1 (satu) unit HP merek Cross warna hitam nomor IMEI 391012081532081

---

<sup>83</sup> *Ibid*

- b) 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna hitam.
- c) 1 (satu) simcard nomor 085222716470

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut ialah:

- a) Menimbang bahwa memerhatikan fakta-fakta yang sudah dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa dalam membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan telah memenuhi dan terbukti.
- b) Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penyebaran Pornografi.
- c) Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa saksi yang terdiri dari: (1) Fransisca Endang Yudianti, (2) Anjar Sopandi dan (3) Turmuzi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan, dimana keterangan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.
- d) Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatannya.
- e) Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan.
- f) Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka didapatlah fakta-fakta dipersidangan dimana keterangan para saksi yang didengar di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti di persidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
- g) Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan

kesalahan terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam jakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- h) Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.
- i) Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
- j) Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena harus dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- k) Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan haruslah dirampas dan dimusnahkan.

Dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat tidak merasa kesulitan karena keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa semuanya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu terdakwa juga mengakui perbuatannya dan membenarkan bahwa semua barang bukti yang dihadapkan dipersidangan benar miliknya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.**

Apabila dilihat dari analisis Hukum Islam penyebaran Pornografi yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam Jarimah yang dimana arti dari jarimah sendiri adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang apabila dilakukan maka akan memperoleh hukuman yang berupa had maupun ta'zir. Dalam hukum Islam sendiri memang tidak dijelaskan secara pasti mengenai pengertian tentang menyebarluaskan Pornografi, disisi lain Islam hanya menjelaskan tentang tata cara berpakaian, dalam Islam juga melarang untuk tidak memperlihatkan aurat karena hal itu akan mendekatkan diri ke perbuatan zina, unsur terpenting dalam konsep Pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu. Allah SWT berfirman dalam surat al-ahزاب ayat 59 sebagai berikut:<sup>84</sup>

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلزَّوْجِ أَكْ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

---

<sup>84</sup>Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam*, (Depok, Mutia Allahmah Utama, 2014) Hlm 338.

*Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.” QS Al-Ahzab 59.*

Yang pada intinya dalam surat Al – Ahzab ayat 59 menerangkan bahwa seorang wanita harus memakai jilbab agar aurat mereka bisa tertutupi dengan jilbab dan terhindar dari perbuatan yang tidak menyenangkan atau terhindar dari gangguan yang biasa dialami oleh perempuan. Dalam Perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebarkan pornografi yang dimana hal itu sangat jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak terpuji, Penyebaran Pornografi juga sangat berdampak negatif bagi orang.

Islam juga secara tegas mengatur tentang masalah Pornografi yang dimana hal ini juga berhubungan dengan cara berpakaian, berdasarkan ketentuan yang mengandung unsur Pornografi, membuat, menyebarluaskan adalah perbuatan haram dan akan membuat orang melakukan perbuatan zina, sedangkan dalam Islam sendiri sangat melarang umatnya untuk mendekati diri ke perbuatan zina dalam Ayat Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra’ ayat 17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ كَأَنَّ فَا حِشَّةً وَ سَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk (QS.Al-Isra’(17):32)*

Dalam Perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT tentang penyebaran Pornografi terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi yang dimana tujuan dari terdakwa adalah untuk memeras saksi Fransisca untuk kebutuhan terdakwa saat di dalam penjara. Dalam kasus Putusan Perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT terdakwa terbukti sengaja membuat dan menyebarkan video yang berisi foto saksi Fransisca, dalam penetapannya termasuk dalam unsur kesengajaan dalam membuat dan menyebarkan. Dalam Hukum Islam memang tidak ditemukan sanksi yang tegas bagi orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menempelkan, mengirim atau menyimpan gambar, dalam Perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT Hal ini masuk kedalam jarimah hudud atau ta’zir. Hukuman bagi penyebar Pornografi akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan Pidana yang harus dikenakan sanksi. Seperti halnya dalam Perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT

menurut Hukum Islam sanksi yang tepat bagi terdakwa adalah jarimah ta'zir, agar perbuatan terdakwa tidak diulangi lagi serta untuk mencegah adanya korban. Dari hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 7 (tujuh) tahun Pidana Penjara maka dilihat dari pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT tentang Tindak Pidana Pornografi yang dimana sudah dijelaskan dalam Jarimah Ta'zir sebagai berikut.<sup>85</sup>

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya.
- b) *Ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meski perbuatannya bukan maksiat.
- c) *Ta'zir* karena pelanggaran. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

Dalam keterangan diatas sudah dijelaskan bahwa terdakwa menyebarkan vidio yang berupa foto-foto saksi korban yang dimana terdakwa dikenakan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut penulis, apabila di kaitkan dengan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT, perkara tersebut sesuai dengan jarimah Ta'zir yang dimana yang tersebut sama-sama merusak kepentingan umum dan merusak akhlak, jika dilihat dari perkara yang diatas bahwa terdakwa dengan sengaja membuat dan menyebarkan vidio foto serta mengancam saksi yang dimana hal ini telah dilarang dalam Undang-Undang Pornografi, hal ini akan berdampak negatif dikalangan masyarakat.

Berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi yang dimana kita dilarang melihat sesuatu yang berbau mesum atau membangkitkan birahi seperti gambar-gambar porno, tulisan, tayangan-tayangan porno, dan lain sebagainya, agar kita dapat memelihara kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina. Hal ini sudah jelas bahwa Islam sangat tegas dalam menegakan kebenaran.<sup>86</sup>

Menurut penulis, dari pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa dengan Hukum Pidana Islam sudah sesuai yaitu hukuman Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp .500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari pertimbangan pemberat hingga pertimbangan meringankan.

---

<sup>85</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, Karya Abadi Jaya. Cet.1, 2015), hlm. 196

<sup>86</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 23

Mengingat bahwa Pornografi dan Pornoaksi semakin meluas di tengah-tengah masyarakat baik melalui media elektronik, media cetak, media komunikasi moderen maupun dalam bentuk nyata. Dalam hal ini Fatwa Majelis Ulama memandang bahwa Pornografi dan Pornoaksi telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi umat Islam sendiri, Pornografi dan Pornoaksi juga merusak generasi muda baik terhadap perilaku dan akhlak serta menimbulkan penyakit – penyakit lainnya seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kelahiran anak diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku menyimpang dan lain sebagainya.

Maka dalam hal ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan perhatian, khususnya dalam Pornografi dan Pornoaksi maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa tentang Pornografi dan Pornoaksi dalam hal ini fatwa Majelis Ulama Indonesia mengingatkan tentang Firman Allah SWT dalam QS. Al- Nur (24):30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا لِيُضْرِبَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS Al- Nur [24]: 30-31)*

Islam juga melarang umatnya memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, seksual dan sejenisnya dalam hal ini maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mengingatkannya dalam hadist dibawah.<sup>87</sup>

عَنِ ابْنِ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أَسَمَةَ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَأَنَّهَا هَذَاهَا دَحِيَّةُ الْكَلْبِيِّ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَازَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَا مِهَا (رواه أحمد في مسنده، كتاب: مسند الأنصار؛ باب: حديث أسامة بن زيد حب رسول الله، رقم: 20787)

*Artinya : Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isterinya. Maka, Rasul bertanya kepadaku: 'mengapa engkau tidak memakai qubthiyah? Saya menjawab: 'wahai Rasul! Saya berikan kepada istriku. 'Rasul bersabda kepadaku: 'Suruh isterimu agar menggunakan rangkapan dibawahnya. Saya khawatir pakaiannya tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya'. "(HR.Ahmad dalam Musnad-nya, kitab Musnad al-Anshar, bab Hadits Usamah Bin Zaid, Nomor 20787).*

Hadis lain yang berhubungan dengan aurat yaitu hadis Nabi SAW tentang aurat perempuan yaitu:<sup>88</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ خَلَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَتِفَيْهِ (رواه أبوودد في سته، كتاب اللباس، باب بما تبدي المرأة من زينتها، رقم: 3580)

*“(Diriwayatkan) dari ‘A’isyah r.a. bahwa Asma’binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah s.a.w. mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah s.a.w. berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, ‘Hai Asma’! seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini” Beliau menunjukan muka dan kedua telapak tangannya.”(HR.Abu Dawud).*

Dalam hal ini Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat, itulah yang kemudian membuat pemuka agama aktif

<sup>87</sup> Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Diakses pada hari Kamis tanggal 13/08/2020 pada jam 01.43 WIB.

<sup>88</sup> Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Diakses pada hari Kamis tanggal 13/08/2020 pada jam 02.27 WIB.

menentang pornografi dan pornoaksi.<sup>89</sup> Maka dari penjelasan diatas maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan Fatwa Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Dan dalam hal ini fatwa dari Majelis Ulama Indonesia juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan atau memutuskan tentang Pornografi dan Pornoaksi. Selain itu fatwa juga sangat relevan dengan maqashid al-syari'ah yang didalamnya bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dalam kehidupan manusia.<sup>90</sup> maka Majelis Ulama Indonesia juga menghimbau bagi masyarakat mengenai Tindak Pidana Pornografi agar masyarakat tidak mendekati sesuatu yang berbau Pornografi, yang dimana hal ini tertera dalam pasal-pasal KUHP yang menyangkut tentang kesusilaan Nomor 278 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Adapun isi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah<sup>91</sup>

- a) Bahwa Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambaran, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah Haram;
- b) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah Haram;
- c) Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah Haram;
- d) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah Haram;
- e) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah Haram;
- f) Berdua intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah Haram;
- g) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan dan telapak kaki bagi perempuan adalah Haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i;
- h) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah Haram;

---

<sup>89</sup> Siti Musdah Mulia, Manajemen Syariat Terapi Islam Menyikapi Pornografi, Jurnal Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, hlm. 86

<sup>90</sup> Bahrul Fawaid, Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, Semarang : UIN Walisongo, 2007

<sup>91</sup> Tim Penyusun, Fatwa MUI Tentang Pornografi Dan Pornoaksi, (Surabaya: MUI Jatim, 2012) hlm. 13



- i) Melakukan suatu perbuatan dan/atau sesuatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah Haram;
- j) Membantu dengan segala bentuk dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah Haram;
- k) Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkandi atas adalah Haram.<sup>92</sup>

Dari penjelasan diatas Maka Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian Pornografi yang dimana Pornografi itu sendiri adalah perbuatan yang tercela atau perbuatan yang melanggar hukum. sedangkan dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan kepada terdakwa berdasarkan hukum Pidana Islam, menurut penulis hal ini sesuai dengan hal-hal yang memberatkan yang dimana perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan dilihat dari hukumannya sendiri yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT yang dikenakan Pasal Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam perkara menyebarluaskan Vidio yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan hukuman Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp .500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan sanksi dalam hukum Pidana Islam untuk kasus penyebaran Pornografi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan perkara Nomor 751/Pid.B./2017/PN.JKT BRT adalah jarimah Ta'zir, karena jika dilihat dari hak yang dilanggar termasuk dalam jarimah Ta'zir yang menyinggung hak individu, dalam hal ini hukuman bagi terdakwa diputuskan oleh hakim, dengan hukuman tersebut diharapkan adanya efek jera baik terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan Tindak Pidana yang sama.

Sedangkan dalam hukuman ta'zir bagi terdakwa adalah untuk melarang atau mencegah terjadinya perbuatan maksiat, dan melarang serta mencegah terjadinya perbuatan yang sama dan hukuman ini untuk memperbaiki prilaku terdakwa agar tidak melakukan perbuatan kemaksiatan ataupun perbuatan yang meresahkan masyarakat lainnya.

---

<sup>92</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pornografi dan Pornoaksi. Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Halaman 401-402

### **C. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.**

Kata Pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Porne dan Graphein yang mana Porne mempunyai arti pelacur sedangkan Graphein mempunyai arti ungkapan. Maka Pornografi artinya Ungkapan pelacur.<sup>93</sup> Sedangkan dalam perspektif Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut RUU arti Pornografi yaitu bentuk ekspresi visual yang berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, dan suara secara terang- terangan menunjukkan atau memperlihatkan kepada publik bagian-bagian tubuh yang sensualitas serta segala bentuk perilaku yang berhubungan dengan seks serta patut diduga akan menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

Pornografi sendiri merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang dimana diatur dalam buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan hal ini tertera dalam Pasal 282 sampai 283 KUHPidana serta dalam buku III Bab VI tentang pelanggaran Kesusilaan yang dimana tertera dalam Pasal 532 sampai 533 KUHPidana.

Dalam Pasal 282 KUHP Tindak Pidana Pornografi berbunyi<sup>94</sup>:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di

---

<sup>93</sup> Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 144.

<sup>94</sup> Andi Hamzah, KUHP&KUHP Edisi Revisi, (Cet. XVIII: Jakarta :Rineka Cipta, 2012), Hlm 112-113

Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm., 22. 27 Ibit., hlm., 22-23. 19 muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Sedangkan dalam Pasal 283 KUHP lebih kebentuk perlindungan terhadap dampak negatif Pornografi anak-anak, hal ini diupayakan agar anak-anak terhindar dari Pornografi.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membaca isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), jika isi tadi sudah diketahui.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Sedangkan dalam Pasal 283 bis KUHP menjelaskan tentang Tindak Pidana mata pencaharian yaitu:

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahriannya dan ketika itu belum laupau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti kerana kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahrian tersebut.

Sesuai dengan perkara Nomor 751/Pid.B/2017.PN.JKT BRT tentang penyebaran Pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Chandy Abdul Rohim alias M. Harru juga mengandung unsur kesusilaan yang dimana terdakwa dengan sengaja memosting vidio dimuka umum. Berdasarkan keterangan didalam Memorie Van Toelichting (MvT) WvS Belanda yang mengatakan bahwa apabila didalam rumusan Tindak Pidana dicantumkan unsur kesengajaan (*opzettelijk*).<sup>95</sup> Yang dimana unsur kesengajaan sendiri adalah setiap batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Maka unsur kesengajaan dalam kejahatan kesusilaan dimuka umum adalah:<sup>96</sup>

1. Sebelum dia (si pembuat)mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendakinya, dan
2. Disarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatannya itu adalah secara terbuka atau dimuka umum.

Hal ini tertera dalam Pasal 281 KUHP yang dimana diancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:<sup>97</sup>

1. Barang siapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;

Dalam perkara Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang penyebaran Pornografi juga erat berhubungan dengan Tindak Pidana ITE yang dimana terdakwa selain mengirimkan vidio secara pribadi di HandPhon saksi, terdakwa juga mengirim vidio saksi Fransisca di media sosial You Tube, yang dimana hal itu bisa dilihat dan diakses oleh siapapun. Hal ini sudah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang dimana sudah dijelaskan didalam pasal<sup>98</sup>:

---

<sup>95</sup> Dikutip dari buku Moeljatno,1983:182. Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,(Jakarta:PT Raja GrafindoPersada:2005) Hlm 12-13

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> Andi hamzah, *KUHP&KUHP* edisi revisi, (Jakarta :Rineka Cipta, 2012). Hlm 111

<sup>98</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

**Pasal 27 Ayat (3)** *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pencemaran nama baik.*

**Pasal 27 Ayat (4)** *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

**Pasal 29** *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.*

Sedangkan Undang-Undang yang mengatur secara tegas tentang Pornografi yaitu Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam Pasal 1 Undang –Undang Pornografi dijelaskan bahwa:

“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dalam pasal 29 Undang – Undang Pornografi juga sudah dijelaskan bahwa<sup>99</sup>:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah)”.

Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU.NO.44/2008

---

<sup>99</sup> Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Atau Kedua : melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP

Dari penjelasan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu: Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang- Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan kedua adalah dakwaan alternatif. Dengan demikian Perkara Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang penyebaran Pornografi dengan terdakwa Chandy Abdul Rohim Alias M.Herru terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang menyesankan ketelanjangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d” dalam hal ini terdakwa melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang- Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hal ini sesuai dengan dakwaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang dimana terdakwa di jatuhkan Pidana Penjara 7 tahun dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Subsidi 6(enam) bulan kurungan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis maka penulis akan memaparkan mengenai Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang penyebaran Pornografi dimana terdakwa telah memenuhi Unsur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d UU.NO.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam hal ini Keputusan Hakim menolak pleidoi dari penasehat Hukum terdakwa karna tidak sesuai dengan kebenarannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah. Dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya karena dilihat dari umur terdakwa sudah dewasa, dalam hal ini terdakwa melakukan tanpa adanya paksaan, tekanan serta melakukan dengan sadar. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya adalah hal salah akan tetapi terdakwa tetap melakukannya maka dari itu Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan Hukuman 7 Tahun dan denda Rp.500.000,000,- dengan pertimbangan yang memberatkan yaitu terdakwa sudah merugikan orang lain, dan terdakwa adalah Recidivis yang sedang menjalani Hukuman Pidana.
2. Dalam Islam sendiri memang belum dijelaskan secara pasti sanksi bagi pelaku Tindak Pidana penyebar Pornografi, Meskipun Tindak Pidana Penyebaran Pornografi tidak di jelaskan sanksinya. tapi dalam hal ini Islam sangat tegas dalam menindak siapapun yang melakukan kesalahan termasuk Tindak Pidana penyebaran Pornografi, karena Tindak Pidana Penyebaran Pornografi sangat berhubungan dengan Tidak Pidana Kesusilaan yang dimana hal ini erat kaitannya dengan berpenampilan (berrpakaian ). Maka Dalam hal Sanksi menurut Hukum Islam yaitu melalui Qiyas dimana hal ini mengambil hukum – hukum yang berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada yaitu hukuman ta'zir atau sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, maka sanksi juga ditentukan oleh Hakim yang berkuasa atau hak Ulil Amri dengan berpedoman yang sudah ditetapkan yaitu Al- Quran dan Hadits. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT, yang dimana terdakwa dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa, hal ini bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi siapapun yang melanggar agar tidak terulang lagi di masyarakat.
3. Dalam hukum positif sudah di jelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Pornografi dengan ancamannya yang tegas. dalam Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian Pornografi yang memberikan

batasan tentang Pornografi yaitu dimana Pornografi sendiri berbentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain yang melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Tujuan dari Undang- Undang Pornografi sendiri untuk melindungi warga negara dari Tindak Pidana Pornografi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat setidaknya menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 10 Tahun seperti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa adalah seorang Recidivis yang sedang menjalani Pidana. Majelis Hakim seharusnya dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim juga harus berpedoman pada asas – asas yang seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian agar hukum tetap bisa ditegakan.
2. Menerapkan sanksi yang lebih tegas, khususnya bagi pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi, agar siapapun yang melakukan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi bisa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari segi Hukum Pidana Islam terdakwa terbukti bersalah dan mendapatkan sanksi ta'zir.
3. Dengan adanya perkara tersebut diharapkan masyarakat dan pihak berwajib saling membantu untuk mencegah berbagai bentuk Tindak Pidana, khususnya Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.

## **C. Penutup**

Demikian skripsi yang dapat penulis buat, besar harapan penulis bahwa skripsi yang penulis buat minimal sebagai bahan kecil dari upaya untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi yaitu dengan kapasitas dan kemampuan penulis sebagai mahasiswa, penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sampaikan mohon maaf dan sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembimbing dan penguji serta siapa saja yang membaca skripsi ini pada umumnya.



## Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal.2005. *Pemidanaan, Pidana, Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3*. Jakarta:Elsam.
- Afif, M Fahmi, 2019, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Semarang : UIN Walisongo
- Ambota, Dalle, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronok (Studi Kasus Putusan No01/Pid.B/2015/PN. Mks), Makasar:Universitas Hasanuddin.
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*, Cet.1:Jakarta : Sinar Greafika.
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bogor:Prenada Media.
- \_\_\_\_\_.2009. *Pornografi dan PorNomoraksi Ditinjau dari Hukum Islam* Cet.III; Jakarta: Kencana.
- Faruk, Asadulloh Al.2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fawaid, Bahrul. 2007. Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan PorNomoraksi:Semarang:UIN Walisingo.
- Gunaidi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A.1987. *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Mulia.
- Hamzah, Andi. 2012. *KUHP&KUHP* Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Cet 1: Jakarta: Amzah.
- Jurnal Ilmu Hukum, Erinda Sinaga Dan Mukhlis R dan Erdiansyah, Tinjauan PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Pornogarfi Menurut Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Volume 8 No 4, Oktober 2014:  
Universitas Riau

Jurnal Suratman, Ardi Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. Volume 1 No. 2 Mei – Agustus 2014.

Kamil, Muhammad Qasim, 2014, Halal-Haram Dalam Islam, (Depok, Mutia Allahmah Utama)

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Cet 1. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka.

Munir, Nurdiman. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Raja Wali Pers.

Nurcholis, 2015, Cyber Pornografi (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Projodikoro, Wirjono. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Edisi ketiga, Bandung : Refika Aditama.

Quthni, Alfi. 2016, Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan Dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn”(Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN Mks). Makasar : UIN Alauddin.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Cet 1: Semarang: Karya Abadi Jaya.

Sa’adah, Marzuki Umar. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta : UII Press.

Siti Musdah Mulia, Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi, Jurnal Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.

Soekanto Soerjono dan Sri Pamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dari Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Diakses pada hari Kamis tanggal 13/08/2020 pada jam 02.27 WIB.

Dikutip Dari Bukunya Prof Sudarto, *Hukum Pidana* 1, Cetakan Ketiga, (Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.

Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia* Surabaya : Lima Bintang.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Tim Penyusun. 2012. *Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornomaksi*. Surabaya: MUI Jatim.

Undang – Undang RI Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Hakim.

Undang – Undang RI Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## WEBSITE

[http://eprints.walisongo.ac.id/194/4/062211004\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/194/4/062211004_Bab3.pdf) , *Tindak Pidana Pornografi dalam Undang – Undang No. 44 TAHUN 2008*, dikutip pada tanggal 30/08/2019, hari jum'at, jam 04.26.

<http://artonang.blogspot.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>. *Unsur-Unsur Tidak Pidana General Knowledge (Pengetahuan Umum)*, diakses pada Hari Senin Tanggal 27/01/2020 Jam 22.49 Wib.

<https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internetindonesia> /0/ sorotan\_media diakses pada hari Minggu pada tanggal 22/12/2019, jam 21.30 Wib.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-barat> Diakses Pada hari selasa tanggal 22/10/2019 jam 12.23 Wib.

<http://hukumtertulis.blogspot.com/2017/05/pasal-182-kuhap-selesai-pemeriksaan.html>, diakses pada hari Minggu, 02 Agustus 2020 pada jam 22.33 WIB.

Surat al-ahzab yang dikutip dari [https:// www . idntimes . com /life /women /muhammad - tarmizi-murdianto/batasan-aurat-wanita/3](https://www.idntimes.com/life/women/muhammad-tarmizi-murdianto/batasan-aurat-wanita/3) pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada jam 23.36.

<https://brainly.co.id/tugas/12231133>, Dikutip Pada Hari Rabu Tanggal 12/08/2020 pada jam 23.41 WIB.

Fajrin Recht, Pidana Dan Pemidanaan (Hukum Penitensier), [http: //kita bpidana. blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html](http://kita.bpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html), diakses pada hari selasa, tanggal 17/03/2020 jam 0202 Wib.

Ray Pratama Siandar, *Pengertian, Jenis-Jenis dan Tujuan Pemidanaan*, [https : // raypratama. blogspot. com/2012 /02/ pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html](https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html), diakses pada tanggal 17/03/2020 hari selasa, jam 02:12 Wib

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agung Ika Restuningsih

Alamat : Ds.Wringinjajar RT.01/03 Kecamatan. Mranggen- Kabupaten Demak

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Mei 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nama Orang Tua : 1. Bapak : Darwadi  
2. Ibu : Kolyati

Alamat :Ds. Wringinjajar RT 01/03 Kecamatan Mranggen – Kabupaten Demak

No Hp / Email : 081319250822 / [ikarestu23@gmail.com](mailto:ikarestu23@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Wringinjajar 03  
2. MTs Hidayatus Syubban  
3. MA Hidayatus Syubban  
4. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi : Osis MA Hidayatus Syubban Semarang 2011-2012  
Dewan Ambalan MA Hidayatus Syubban Semarang 2012-2013